

No. 191 Januari 2022

BaKTI News

www.baktinews.bakti.or.id

MEMAHAMI KTI DENGAN SEKSAMA



**MEMPERKUAT
PERLINDUNGAN ANAK
DI MASYARAKAT**

**MENDUKUNG
PELABUHAN PERIKANAN
DI ARU, PEMERINTAH
AGAR SEJAHTERAKAN
MASYARAKAT LOKAL**

**TEKAD BERSINERGI ITU
BERMULA DI DISTRIK KAIMANA**

TIDAK DIPERJUALBELIKAN
NOT FOR SALE

ISSN 1979-777X



9 771979 777057



BaKTI**News**

MEMAHAMI KTI DENGAN SEKSAMA

ISSN 1979-777X

www.baktinews.bakti.or.id

Penanggung Jawab **M. YUSRAN LAITUPA**
ZUSANNA GOSAL
Editor **VICTORIA NGANTUNG**
ITA MASITA IBNU

Editor Foto **ICHSAN DJUNAED**
Design & Layout **ICHSAN DJUNAED**
Sirkulasi **KHAIRIL ANWAR**

Redaksi

Jl. Daeng Ngeppe No. 1/10, Makassar 90223, Sulawesi Selatan - Indonesia Telp. +62 0411 832228 / 833383

Email info@bakti.or.id atau baktinews@bakti.or.id

Facebook www.facebook.com/yayasanbakti Twitter [@InfoBaKTI](https://twitter.com/InfoBaKTI) Instagram [@InfoBaKTI](https://www.instagram.com/InfoBaKTI)

BaKTI**News** adalah media pertukaran pengetahuan tentang pembangunan di Kawasan Timur Indonesia. Tujuan BaKTI**News** adalah mempromosikan praktik cerdas pembangunan dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia agar dapat diketahui oleh khalayak luas dan menginspirasi pelaku pembangunan di berbagai daerah dalam upaya menjawab berbagai tantangan pembangunan. BaKTI**News** terbit setiap bulan dalam dua bahasa, Indonesia dan Inggris, untuk memudahkan pembaca dalam mendapatkan informasi pembangunan dari Kawasan Timur Indonesia.

BaKTI**News** disirkulasi melalui pos kepada pembaca dengan target utama adalah para pelaku pembangunan yang berdomisili di daerah kepulauan dan daerah terpencil. Tidak dikenakan biaya apapun untuk berlangganan BaKTI**News** agar lebih banyak masyarakat yang dapat mengakses informasi pembangunan melalui majalah ini. Selain dalam bentuk cetak, BaKTI**News** juga dapat diakses di website BaKTI: www.baktinews.bakti.or.id dan dikirimkan melalui email kepada pelanggan yang dapat mengakses internet.

BaKTI**News** dikelola oleh Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI). Seluruh artikel BaKTI**News** adalah kontribusi sukarela para pelaku pembangunan dari berbagai kalangan dan daerah yang ingin berbagi pengetahuan dengan khalayak luas.

*BaKTI**News** is a knowledge exchange media platform for development issues in eastern Indonesia. BaKTI**News** aims to promote development smart practices from different regions in eastern Indonesia so that the practices become known to a wider audience and inspire development stakeholders in other regions in their efforts to answer development challenges. BaKTI**News** is published monthly in two languages, Indonesian and English, to facilitate readers who don't understand Indonesian to gain a better understanding of development in eastern Indonesia.*

*BaKTI**News** is sent by post to readers and the main target is development stakeholders living in isolated regions and island regions. BaKTI**News** is provided free of charge so the development community can access relevant development information easily. BaKTI**News** is also provided in an electronic version that can be accessed on www.baktinews.bakti.or.id and can be sent electronically to subscribers with internet access.*

*BaKTI**News** is managed by the Eastern Indonesia Knowledge Exchange (BaKTI). All articles are contributed voluntarily by development stakeholders from different areas in eastern Indonesia who wish to share their information with a wider audience.*

BERKONTRIBUSI UNTUK BaKTI**News**

Contributing to BaKTI**News**

BaKTI**News** menerima artikel tentang praktik baik dan pembelajaran program pembangunan, hasil-hasil penelitian dan pemanfaatan teknologi tepat guna dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua). Panjang artikel adalah 1.000 - 1.100 kata, menggunakan Bahasa Indonesia, ditulis dengan gaya populer. Foto-foto penunjang artikel sangat dibutuhkan. Tim editor BaKTI**News** akan melakukan edit terhadap setiap artikel yang akan dimuat untuk kesesuaian tempat dan gaya bahasa. Redaksi BaKTI**News** tidak memberikan imbalan kepada penulis untuk setiap artikel yang dimuat.

*BaKTI**News** accepts articles about good practices and lesson learnt from development programs, applied research results, and applied technology from different stakeholders and regions in eastern Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, and Papua). Articles should be 1,000-1,100 words, in either Indonesian or English, and written in a popular style.*

*Articles should also be sent with photos that illustrate the article. Our editor team will edit each article to ensure the language style and available space. BaKTI**News** does not provide fee for authors who contribute articles for this magazine.*

MENJADI PELANGGAN BaKTI**News**

Subscribing to BaKTI**News**

Anda dapat mengisi formulir yang tersedia pada laman BaKTI**News** Online baktinews.bakti.or.id untuk dapat menerima majalah BaKTI**News** langsung ke email Anda setiap bulannya. Jika Anda tinggal di Makassar, Anda dapat mengambil majalah BaKTI**News** cetak di Kantor BaKTI setiap hari kerja.

*You may fill out the form available on the BaKTI**News** Online page to be able to receive BaKTI**News** magazine directly to your email every month. If you live in Makassar, you can pick up the printed BaKTI**News** magazine at the BaKTI office on weekdays.*

Daftar Isi

BaKTINews

Januari 2021

No. 191

- 1** Memperkuat Perlindungan Anak di Masyarakat
Oleh **M. GHUFRAN H. KORDI K.**
- 7** Mendukung Pelabuhan Perikanan di Aru, Pemerintah Agar Sejahterakan Masyarakat Lokal
Oleh **NURDIN TUBAKA**
- 12** Hadakewa, Desa dengan BUMDes Digital
Oleh **SUMARNI ARIANTO**
- 15** Tekad Bersinergi Itu Bermula di Distrik Kaimana
Oleh **HALIA ASRIYANI**
- 18** Forum Kepala Bappeda Provinsi Se-KTI “Penyusunan Kebijakan Berbasis Pengetahuan”
- 21** Belajar dari Pendataan Pandemi COVID-19 untuk Mengendalikan HIV/AIDS di Indonesia
Oleh **BENJAMIN HEGARTY, AMALIA PURI HANDAYANI, KRISTAL SPREADBOROUGH, PRIYANKA PILLAI**
- 25** Beli Secukupnya, Pakai Semuanya di Artani Bulk Store
Oleh **ITA IBNU**
- 29** Mempertanyakan Kesiapan Polisi Tangani Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia
Oleh **ARSA ILMI BUDIARTI**
- 33** Menelisik Kendala Status ODF di Kabupaten
Oleh **HAMSAH SINRING & SALEH JASTAM**
- 37** Ini Cara Ibu-Ibu Halmahera Selatan Belajar Ilmu Bertani
Oleh **MAHMUD ICHI**
- 40** Diskusi *Online Live* di Instagram Story @infobakti
- 41** Terbaru di Batukarinfo

Foto Cover: **Silvania Mandaru**

MEMPERKUAT PERLINDUNGAN ANAK DI MASYARAKAT

Oleh
M. GHUFRAN H. KORDI K.

Kasus-kasus kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak, umumnya terjadi di dalam keluarga dan pelakunya adalah orang-orang terdekat, seperti orang tua, pengasuh, dan keluarga. Anak juga mengalami kekerasan di lingkungan sekolah, berbagai tempat belajar dan pelatihan, hingga rumah ibadah, yang pelakunya adalah guru/pendidik, tutor/pelatih, hingga orang-orang yang mengurus dan mengkhotbahi jamaah di rumah-rumah ibadah.

Dengan demikian, kekerasan terhadap anak terjadi di ranah domestik dan lingkungan yang menjadi tempat anak beraktivitas. Kasus-kasus yang terjadi di area domestik merupakan kasus yang sulit teridentifikasi dan terjangkau oleh pekerja sosial atau tenaga layanan, baik karena “tertutup” maupun karena dianggap sebagai wilayah domestik atau masalah keluarga sehingga oleh orang-orang yang melihat dan mengetahuinya pun mendiamkan.

Sementara anak yang mengalami kekerasan di sekolah, tempat belajar hingga rumah ibadah, sering ditutupi oleh orang yang melihat dan mengetahuinya, untuk menjaga nama baik orang-orang tidak baik yang menjadi pelakunya. Orang-orang dewasa lupa, tidak sadar, atau tidak mempunyai pengetahuan, bahwa pelaku kekerasan terhadap anak adalah orang-orang



dewasa yang mempunyai hubungan tidak setara dengan anak, sehingga anak mempunyai posisi rentan dan dengan mudah dimanipulasi oleh pelaku.

Masyarakat merespons kekerasan terhadap anak dengan berbagai cara. Ada yang 'memaklumi' dan menganggapnya sebagai masalah keluarga atau rumah tangga. Ada yang menyalahkan korban sebagai anak yang harus dididik dengan cara kekerasan. Sebagian besar permisif dan menganggapnya sebagai hal biasa saja. Dan hanya sedikit yang mencoba mencegah, membantu korban, hingga melaporkan kepada lembaga layanan. Yang terakhir ini biasanya dilakukan oleh tokoh masyarakat, aparat pemerintah, atau kader-kader desa yang mempunyai kepedulian.

Pengasuhan Tradisional

Beragamnya bentuk respons terhadap anak yang mengalami kekerasan dan membutuhkan



Foto: Yayasan BaKTI

pertolongan, sangat berhubungan dengan cara berpikir dan cara mengasuh anak di masyarakat. Masyarakat masih menempatkan anak sebagai hak milik, properti, tidak tahu apa-apa, harus menurut, dan harus menjadi anak baik versi orang tua, pengasuh, dan orang dewasa. Anak yang ke luar dari cara pandang dan penempatan tersebut harus “diluruskan” dan ditarik kembali ke jalan yang benar versi orang tua, pengasuh, dan orang dewasa.

Masalahnya, orang tua, pengasuh, dan orang dewasa yang ada tidak selalu mempunyai perspektif yang tepat mengenai anak. Mereka juga mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang terbatas mengenai pengasuhan, yang diwarisi secara turun-temurun. Di sisi lain, perubahan sosial dan perkembangan teknologi menempatkan anak sebagai individu yang membutuhkan ruang ekspresi yang lebih besar, yang tidak tepat jika direspons dengan pola pengasuhan tradisional atau konvensional.

Pengasuhan tradisional yang sangat baik adalah pola pengasuhan anak di dalam keluarga besar, di mana tanggung jawab mengasuh, membesarkan, dan melindungi anak berada di dalam keluarga besar. Bahkan di desa-desa, pengasuhan dan perlindungan anak dilakukan bersama oleh masyarakat desa. Namun, pola-pola pengasuhan tradisional menempatkan anak sebagai objek yang mengalami kekerasan.

Anak-anak yang dianggap nakal dan sulit ditangani, akan mengalami kekerasan bertingkat karena mengalami kekerasan di dalam keluarga dan masyarakat. Anak juga mengalami stigma di dalam keluarga dan masyarakat sebagai anak kurang ajar dan pembuat onar, sehingga ditempatkan sebagai objek dan dianggap sah mengalami kekerasan.

Padahal orang tua/keluarga dan masyarakat tidak mempunyai pengetahuan dan keterampilan dalam mengasuh dan menangani anak-anak yang dianggap nakal dan sulit ditangani.



Hasilnya adalah anak mengalami kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah.

Mekanisme Berbasis Masyarakat

Pengasuhan tradisional yang menempatkan anak sebagai tanggung jawab keluarga besar, komunitas, dan masyarakat, perlu dilestarikan, karena tetap relevan dengan moral pemenuhan hak dan perlindungan anak saat ini. Jika anak kehilangan orang tua atau pengasuh utama, maka anak tidak boleh dipisahkan dari komunitas atau lingkungannya, kecuali untuk kepentingan terbaik bagi anak.

Demikian juga, jika anak mengalami kekerasan atau eksploitasi yang dikategorikan sebagai kasus berisiko ringan, maka kasus tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan di tingkat masyarakat atau pemerintah terdekat (RT, RW, kepala dusun, kepala desa/lurah). Ini untuk mencegah terjadinya kasus berulang dan melindungi anak dari publikasi dan stigma di masyarakat.

Demikian pula, untuk kasus dikategorikan sebagai kasus serius dan berat, sehingga anak harus membutuhkan pertolongan, penanganan, dan perlindungan di lembaga layanan, maka harus

ada orang-orang yang menyediakan waktu dan tenaganya untuk melakukan pertolongan pertama, perlindungan sementara, dan merujuk anak tersebut di lembaga layanan, yang berada di tingkat kabupaten atau kota.

Karena itu, komunitas atau masyarakat harus diperkuat sehingga menjadi lingkungan yang kondusif bagi pengasuhan anak, sekaligus responsif terhadap perlindungan anak. Perlu adanya orang-orang tertentu yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pencegahan, mengidentifikasi, dan merujuk korban di lembaga layanan.

Untuk itu, Yayasan BAKTI atas dukungan UNICEF (United Nations Children's Fund) melalui Program Penguatan Lingkungan Aman dan Ramah Anak (Strengthening Safe and Friendly Environment for Children-SAFE4C) melakukan kegiatan-kegiatan untuk memperkuat kelembagaan perlindungan anak di tingkat desa dan kelurahan di Kabupaten Maros, Gowa, Bulukumba, dan Kota Makassar, di antaranya melalui pembentukan dan penguatan kelembagaan kesejahteraan sosial dan perlindungan anak.



Foto-foto: Yayasan BaKTI

Salah satunya adalah melalui pengembangan mekanisme, penyusunan standar operasional prosedur (SOP), dan pengujian layanan berbasis masyarakat di tingkat desa/kelurahan. Pengembangan mekanisme dan SOP yang ada diharapkan menjadi panduan bagi lembaga layanan di tingkat desa/kelurahan.

PATBM dan Shelter Warga

Sejak tahun 2018 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mengembangkan PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) sebagai lembaga perlindungan anak terpadu di tingkat desa dan kelurahan. Sementara di mulai tahun 2017 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makassar mengembangkan *Shelter Warga* sebagai lembaga perlindungan perempuan dan anak terpadu di tingkat kelurahan, dan merupakan lembaga yang terhubung dengan UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) Kota Makassar. *Shelter Warga* adalah lembaga layanan yang berbasis masyarakat.

Yayasan BaKTI melalui Program SAFE4C membentuk dan memperkuat PATBM dan *Shelter Warga* sebagai lembaga kesejahteraan sosial dan perlindungan anak berbasis masyarakat di desa dan kelurahan. Pembentukan dan penguatan PATBM dan *Shelter Warga* di tingkat desa dan kelurahan adalah dukungan terhadap program pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk memperkuat pelayanan kesejahteraan sosial dan perlindungan anak berbasis masyarakat.

Di sisi lain, sejumlah desa dan kelurahan yang telah memiliki kelembagaan perlindungan anak atau program dan kegiatan perlindungan anak, memperoleh dukungan untuk semakin memperkuat program dan kegiatan perlindungan anak. Sebagaimana dikemukakan oleh Sultan, Kepala Desa Bonto Tallasa, Kabupaten Maros bahwa, pemerintah desa membutuhkan dukungan dan dampingan dari pemerintah kabupaten dan lembaga-lembaga seperti Yayasan BaKTI dan UNICEF agar perlindungan anak di desa dapat dipercepat dan tepat. Sementara Darawati, Kepala Desa Sambueja, Kabupaten Maros, menyebut desanya diharapkan menjadi desa yang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak, karena itu pemerintah desa dan masyarakat membutuhkan dukungan untuk pengembangan dan penguatan kelembagaan.

Pembentukan dan penguatan PATBM, *Shelter Warga*, atau nama lainnya di tingkat desa harus disesuaikan dan mengakomodasi potensi dan sumber daya yang ada di desa. Sebagai lembaga berbasis masyarakat, kekuatannya terletak pada kader desa, tokoh masyarakat, dan pemerintah desa, yang selama ini telah berperan dalam kegiatan-kegiatan di desa, termasuk di dalam perencanaan dan penganggaran di desa.

Karena itu, mengakomodasi pihak-pihak tersebut juga merupakan bagian dari advokasi untuk perencanaan dan penganggaran desa yang berpihak pada kesejahteraan sosial dan perlindungan anak di desa.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang program Kerja Sama Unicef - BaKTI dapat menghubungi info@bakti.or.id



MENDUKUNG PELABUHAN PERIKANAN DI ARU, Pemerintah agar sejahterakan masyarakat lokal

Oleh **NURDIN TUBAKA**

M

enteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengunjungi Pelabuhan Perikanan Benjina yang terletak di Kepulauan Aru, Maluku, Selasa (30/11/2021). Dia mendukung penuh pelabuhan tersebut beroperasi kembali untuk menggenjot geliat perikanan di Maluku serta mendukung implementasi penerapan kebijakan penangkapan terukur.

“Persiapkan dengan baik agar 2022 pelabuhan ini dapat segera dioperasikan dan roda perekonomian bergerak,” ujar Menteri Trenggono.

Pelabuhan Perikanan Benjina yang dikelola oleh pihak swasta ini, sempat



Foto: Yoga Putra, USAID SEA-CTC

beroperasi hingga 2014. Namun aktivitasnya kian meredup seiring terbongkarnya kasus perbudakan ABK asing yang bekerja di salah satu perusahaan perikanan yang beroperasi di sana.

Kembali beroperasinya Pelabuhan Perikanan Benjina dianggap penting untuk mendukung mata pencaharian masyarakat sekitar sebagai nelayan. Pelabuhan Benjina memiliki dermaga dengan kapasitas tampung hingga 100 kapal dengan panjang dermaga hingga 62 meter.

“Tenaga ABK harus dari nelayan lokal. Selain nilai tukar meningkat, lalu kita arahkan mereka juga ke budidaya. Maka mereka akan lebih sejahtera,” tegas Menteri.

Seiring rencana kembali beroperasinya pelabuhan perikanan ini, kapal-kapal yang

sudah lama bersandar dan mengalami kerusakan tengah dalam perbaikan. Total ada 36 kapal yang diperbaiki di Ambon.

Trenggono menjelaskan, keberadaan pelabuhan ini sekaligus dapat mendukung implementasi kebijakan penangkapan terukur yang mulai diberlakukan awal tahun 2022 dan program Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN).

Melalui kebijakan penangkapan terukur, pendaratan ikan harus dilakukan di pelabuhan yang tidak jauh dari area penangkapan, agar tercipta distribusi ekonomi ke daerah sehingga tidak lagi terpusat di Pulau Jawa.

“Ini bisa menjadi momentum untuk menghidupkan kembali roda ekonomi. Kalau ekonomi bergerak suppliernya kan banyak juga untuk masyarakat sekitar,” tegas Menteri Trenggono.

Fasilitas Pokok

Sementara Bupati Kepulauan Aru, dr. Johan Gongga, mengatakan siap membantu memperbaiki fasilitas pelabuhan demi kelancaran perekonomian tangkap di sana.

Untuk operasional pelabuhan diperlukan fasilitas pokok seperti dermaga, drainase, kolam pelabuhan. Kemudian fasilitas fungsional seperti tempat pemasaran ikan, fasilitas air bersih, es dan listrik, fasilitas pemeliharaan kapal dan fasilitas lainnya. Serta fasilitas penunjang seperti balai pertemuan nelayan, pengelolaan pelabuhan, keselamatan pelayaran, serta karantina ikan.

“Kami siap bantu, beserta Pemda dan pihak-pihak yang terkait agar 2022 segera bisa dimulai,” ujar Johan.

Menanggapi persoalan tersebut, Welem Waileruny, Dosen FPIK Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon menyebut, Kabupaten Kepulauan Aru ada dalam WPP 718 yakni Laut Arafura dengan besar potensi sumber daya perikanan 21 persen dari Potensi Perikanan Nasional sesuai Kepmen KP No.50/Kepmen-KP/2017.

“Mungkin ada perubahan potensi SD Perikanan setelah dikeluarkan yang baru oleh Komnas Kajiskan,” katanya kepada Mongabay pada pertengahan Desember 2021.



Arafura Potensial

Fakta menunjukkan, kata dia, bahwa Laut Arafuru merupakan salah satu daerah penangkapan potensial di Indonesia sejak dulu. Meski begitu, kondisi tersebut berbanding terbalik dengan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Di mana, masyarakat Kepulauan Aru termasuk dalam kelompok masyarakat termiskin di Indonesia.

“Ironis memang, lautnya kaya dengan sumber daya perikanan, namun masyarakatnya begitu miskin. Memang di sana ada orang-orang kaya namun kekayaan hanya menumpuk pada sebagian kecil masyarakat,” ujarnya.

Menurut Sekjen DPD Himpunan Alumni IPB Maluku ini, ada jurang yang dalam antara sebagian kecil masyarakat dan kebanyakan masyarakat lokal di sana. Dengan demikian, tepat jika Menteri Perikanan dan Kelautan kembali mengaktifkan Pelabuhan Perikanan di Desa Benjina yang sudah sekian lama dibiarkan menganggur.

Pengaktifan kembali Pelabuhan Perikanan yang ada memungkinkan aktifitas ekonomi akan tumbuh dan perekonomian masyarakat sekitar akan sedikit terbantu.

Kondisi ini akan lebih membantu jika penyerapan tenaga kerja lebih diutamakan untuk tenaga kerja lokal sebagaimana disampaikan Menteri, karena apalah gunanya jika semua itu dilakukan lalu pekerjaannya didominasi tenaga

kerja dari luar. Sementara masyarakat lokal terutama masyarakat adat, hanyalah penonton atau buruh kasar pada level terendah.

Tenaga Kerja Luar

Welem mengatakan, eksploitasi sumber daya perikanan di Laut Arafura sudah berlangsung sejak dulu secara intensif oleh industri penangkapan ikan skala besar. Walaupun demikian, kondisi ekonomi masyarakat adat tidak beranjak secepat tingkat eksploitasi sumber daya perikanan yang ada.

Hal ini diakibatkan lantaran semua hasil yang dieksploitasi dan uangnya dibawa keluar. Sisi lain, katanya, tenaga kerja lebih banyak datang dari luar.

Kenyataan menunjukkan bahwa saat ini ada ratusan bahkan ribuan kapal yang beroperasi di Laut Arafura, namun masyarakat adat hampir tidak ada di sana. Sehingga itu, butuh kerja keras pemerintah daerah dan topangan pemerintah pusat, agar kesenjangan sosial masyarakat adat dapat terjembatani.

Menurutnya, Kabupaten Kepulauan Aru secara keseluruhan tergolong dataran rendah. Dengan demikian, tidak banyak lahan darat yang dapat dijadikan lahan pertanian atau perkebunan yang besar sehingga ketergantungan utama masyarakat adalah laut dengan hasil perikanan.



(Kiri) Petugas dari KKP memeriksa kapal-kapal Antasena milik PT. PBR di Benjina, Aru, pada Jumat (03/04/2015) yang menemukan ternyata ABK-nya adalah Warga Negara Asing asal dari Thailand, Myanmar, Laos dan Kamboja. Foto: **KKP**

(Kanan atas) Pengukuran ikan tuna milik nelayan Jambula, Ternate, Maluku Utara oleh enumerator MDPI. Foto: **MDPI**

(Kanan bawah) Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono saat melihat Pelabuhan Perikanan Benjina di Kepulauan Aru, Maluku, akhir November 2021. Foto: **KKP**



Menteri sudah memberikan isyarat bahwa nelayan (ABK) kapal-kapal penangkap ikan adalah tenaga kerja lokal. Pertanyaannya kemudian, lanjutnya, kebijakan lanjutan apa yang dilakukan Menteri untuk menekan para pengusaha harus menggunakan tenaga kerja lokal.

“Selain itu, sejauh mana pemerintah daerah mempersiapkan tenaga kerja lokal untuk ada dalam pertarungan itu,” ujarnya.

Menurutnya, jika tidak ada kebijakan lanjutan Menteri Perikanan dan Kelautan, dan didukung upaya pemerintah daerah mempersiapkan tenaga kerja, selain mendukung masyarakat adat untuk ada dalam aktivitas ekonomi pendukung industri penangkapan ikan, maka dipastikan kondisi masyarakat adat kian hari akan lebih buruk dari hari-hari sebelumnya.

Artinya, gaya hidup, cara kerja, cara pandang masyarakat terhadap masa depan harus diubah. Dimana, pemerintah tidak boleh tinggal diam dengan kegiatan rutin, lalu membiarkan masyarakat berinisiatif sendiri.

“Jika ketimpangan sosial dibiarkan maka konflik sosial pasti akan terjadi. Bahkan perampasan atas hak-hak masyarakat adat lokal juga akan terjadi,” katanya.

Kesejahteraan Masyarakat

Dia menegaskan, pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat

sesuai amanat UUD, bahwa bumi air dan kekayaan alam yang ada di dalamnya harus digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

Masyarakat lokal terutama masyarakat adat berhak menikmati kekayaan alam yang ada. Artinya, mereka bukan subjek tetapi objek pembangunan. Menurutnya, kekayaan alam bukan saja diperuntukkan bagi sekelompok masyarakat, tetapi kolektivitas masyarakat.

Masyarakat adat, kata dia, memang lemah dari sisi modal, keterampilan, etos kerja dan teknologi. Karena itu, mereka harus dibina, dilatih, diberikan suntikan modal dan pendampingan.

“Mereka juga harus dihukum atas berbagai tindakan perusakan lingkungan atau kejahatan lain jika itu terjadi. Namun mereka juga harus diperlakukan adil di depan hukum, mereka tidak boleh dimanfaatkan oleh kepentingan apapun,” tegasnya.

Dia juga mengatakan, langkah Bupati Kepulauan Aru, membantu memperbaiki fasilitas pelabuhan merupakan tindakan yang tepat. Namun harus dipastikan, manfaatnya tidak jatuh lebih besar untuk kepentingan para investor tetapi lebih ke masyarakat Aru.

Selain itu harus ada kebijakan, mendorong dan mempersiapkan masyarakat ada dalam setiap aktivitas ekonomi yang muncul. Pemerintah harus mampu mengidentifikasi aktivitas ekonomi yang muncul dari kegiatan penangkapan ikan yang berbasis di pelabuhan perikanan dan mempersiapkan bahkan memfasilitasi masyarakat adat untuk terlibat.

“Sehingga uang rakyat yang digunakan itu bermanfaat sebesar-besarnya untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat Aru, bukan untuk meningkatkan keuntungan investor,” ujarnya.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Artikel ini bersumber dari: <https://www.mongabay.co.id/2021/12/13/mendukung-pelabuhan-perikanan-di-aru-pemerintah-agar-sejahteraan-masyarakat-lokal/>

HADAKEWA

DESA DENGAN BUMDES DIGITAL

Oleh **SUMARNI ARIANTO**

Hadakewa adalah sebuah desa pesisir dengan pantai yang indah di wilayah tengah Pulau Lembata yang berjarak sekitar 13 kilometer dari Lewoleba, ibu kota Kabupaten Lembata, NTT. Warga desa Hadakewa mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan. Jumlah penduduknya berjumlah sekitar 1.050 jiwa. Komoditas unggulan desa ini adalah ikan teri.

Usaha teri Hadakewa yang dikelola melalui BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) yang diberi nama Tujuh Maret menuai apresiasi dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) sehingga terpilih masuk dalam nominasi 15 BUMDes digital nasional pada 2020, yang mewakili NTT bersama BUMDes Au Wula di Kabupaten Ende yang mengembangkan usaha hortikultura.

Spesies laut dengan nama ilmiah *Stolephorus sp* atau yang dikenal dengan teri mengangkat nama Hadakewa kian terkenal terutama di pasar komoditas kelautan dan perikanan di tanah air.

Produksi ikan teri dulunya hanya kegiatan rutin yang biasa bagi warga nelayan di Hadakewa, namun di tahun 2018 lalu komoditas ini mulai diproduksi secara serius melalui BUMDes Tujuh Maret.

Pada awalnya, produk ikan teri yang dipasarkan juga masih sebatas untuk kebutuhan lokal maupun melayani pemesanan dalam jumlah kecil. Namun seiring berjalannya waktu, usaha ikan teri Hadakewa kian meningkat karena adanya intervensi melalui alokasi bantuan dari APBN.

Adalah Klemens Kwaman, kepala desa muda Hadakewa sarjana teknik elektro dari salah satu kampus di Makassar yang mengantar Tujuh Maret memperoleh penghargaan baik tingkat kabupaten maupun level nasional serta menghadirkan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan bagi warganya.

Sejarah Pendirian BUMDes Tujuh Maret

Setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa sudah menjadi subjek dan objek pembangunan. Sebelumnya desa hanya menjadi objek.



“Dulu perencanaan dibuat di tempat lain sedangkan objek ada di desa, entah cocok untuk desa kita tidak pernah tahu” ungkap Klemens Kwaman. Tetapi dengan undang-undang ini, desa diberi kewenangan untuk mengatur dirinya sendiri. Salah satu poin dalam undang-undang tersebut adalah terkait BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa.

Membangun BUMDes dimaknai oleh Klemens Kwaman dengan melihat potensi yang dimiliki desa, tidak hanya karena ada perintah dari undang-undang, kementerian atau pihak lainnya. BUMDes dibentuk harusnya bukan sebagai formalitas, di mana hanya ada kegiatan administrasi tapi kegiatan usaha tidak terlihat, menurutnya. Hal ini yang kemudian melatari Klemens Kwaman mulai mengembangkan BUMDes di Hadakewa. “Saya melihat potensi yang ada di Hadakewa begitu besar, cocok untuk mendirikan BUMDes, sehingga di tahun 2017 kami sepakat mendirikan BUMDes yang kemudian kami tetapkan di tahun 2018 dengan potensi terbesar di Hadakewa adalah laut. Potensi ini kemudian diatur oleh perusahaan milik desa” ungkap Klemens.

Nama Tujuh Maret dipilih karena sejarah berdirinya kabupaten Lembata diawali dari desa Hadakewa. Otonomi Kabupaten Lembata diawali di tanggal Tujuh Maret tahun 1954.

Klemens Kwaman, kepala desa muda Hadakewa
Sumber: Tangkapan layar Youtube/**BAKTI KOMINFO**

Kondisi Hadakewa Sebelum Pendirian BUMDes

Populasi Desa Hadakewa ada 1.050 jiwa, di mana mayoritas berprofesi sebagai nelayan dan petani. Klemens menyebutnya nelayan adalah petani dan petani adalah nelayan karena warga desa menjalani dua profesi ini. Sebelum adanya BUMDes semua berjalan seperti biasa, hanya saja manajemen atau potensinya tidak dimanfaatkan secara maksimal. Di awal berdirinya, BUMDes hanya ada unit pengolahan ikan teri. Jauh sebelum BUMDes berdiri usaha ikan teri sudah ada namun potensi ini belum dimanfaatkan dengan maksimal.

Dahulu tiap kali nelayan pergi melaut, hasil tangkapan yang dibawa pulang tidak diatur dengan baik. Potensi kelautan di Hadakewa sangat besar, idealnya potensi besar berbanding lurus dengan perekonomian tetapi kenyataannya malah berbanding terbalik. Setelah Klemens dan tim menganalisa situasi ini diketahui bahwa penyebabnya ada di manajemen. “Cara berpikir nelayan sebelumnya adalah, hanya untuk hari ini tanpa memikirkan hari esok akan makan apa” cerita Klemens. BUMDes hadir untuk memberikan manajemen yang baik, kini nelayan pergi melaut mencari ikan, saat pulang mereka menyerahkan hasil tangkapan ke BUMDes, kemudian BUMDes yang mengatur pemasarannya melalui digitalisasi.

Tantangan di awal BUMDes diperkenalkan

SDM (sumber daya manusia) dan rendahnya pemahaman warga adalah tantangan yang dihadapi di awal pembentukan BUMDes. Selama ini masyarakat sudah merasa cukup nyaman dengan pola yang dikembangkan. Membawa mereka keluar dari zona nyaman agak sulit. Butuh waktu untuk bisa meyakinkan masyarakat, butuh waktu sekitar 2 tahun sejak 2017 hingga akhir 2019. Mereka beranggapan bahwa toh selama ini juga mereka bisa menjual ikan tanpa BUMDes. Tetapi ini yang berbeda bahwa dulu bukan nelayan yang menentukan harga tetapi orang lain, untung atau buntung yang penting bisa terjual. Melalui BUMDes ini pemerintah desa hadir untuk membantu masyarakat, memfasilitasi nelayan agar terinya menemukan pasar yang tepat dengan harga yang menguntungkan.



Manfaatkan Dana Desa

Usaha ikan teri Hadakewa mengalami perubahan drastis berkat dukungan modal dari program Dana Desa. Pada tahap awal, pemerintah desa dan masyarakat Hadakewa sepakat untuk mengalokasikan Dana Desa senilai 85 juta rupiah kepada BUMDes Tujuh Maret untuk memulai usaha ikan teri. Dana ini digunakan untuk pengadaan sarana pendukung seperti tempat pengeringan, waring, dan juga modal untuk pengadaan bahan baku, serta bahan kemasan. Selanjutnya pada 2019, Dana Desa kembali dikurirkan sebesar 128 juta rupiah untuk pengadaan kapal yang dikelola warga desa dalam rangka memperkuat pasokan bahan baku dari nelayan tangkap.

Selama ini warga desa hanya pekerja di kapal-kapal nelayan pemasok ikan teri yang kebanyakan milik orang luar desa. Pada tahun 2019 Hadakewa menerima suntikan dana dari Pemerintah Kabupaten Lembata sebesar 200 juta rupiah karena terpilih sebagai Desa Tematik dengan penilaian pertumbuhan ekonomi yang cepat. Dana ini kemudian digunakan untuk membagi beban anggaran antara Dana Desa,

untuk penyertaan modal ke BUMDes. Dari dana ini telah dibelanjakan sebanyak tiga unit kapal ikan, dan kini sudah beroperasi untuk produksi bahan baku. Ketiga armada kapal ini dioperasikan oleh warga Hadakewa sendiri. Untuk pengembalian modal, tidak dalam bentuk uang melainkan dibayar secara cicil dengan pasokan ikan teri hasil tangkapan nelayan.

Hal Menarik dari BUMDes

Klemens menceritakan bahwa ada nilai edukasi yang diberikan kepada masyarakat nelayan terutama terkait manajemen, pengenalan teknologi, memasarkan produk, membuka lapangan kerja. Terkait lapangan kerja, unit usaha ikan teri memberi pekerjaan untuk mama-mama dengan bekerja mengolah teri. Rata-rata penghasilan mereka per hari adalah 50 ribu rupiah. Bapak-bapak nelayan diberi pemahaman bahwa jika mereka menjual ikannya ke BUMDes-dan bukannya ke kapal-kapal besar-maka secara tidak langsung juga memberi pekerjaan kepada mama-mama di darat yang kemudian memproses teri ini.



(kiri) Warga memulai proses pengeringan ikan teri. (kanan atas) Ikan teri segar hasil tangkapan, setidaknya ada 7 jenis ikan teri yang tersebar di perairan Lembata (kanan bawah) Armada penangkap ikan milik masyarakat desa Hadakewa. Sumber foto: Tangkapan layar Youtube/**BUMDES Tujuh Maret Desa Hadakewa**



warga menjadi bos di kapalnya sendiri. Kepemilikan bisa mereka cicil, cicilnya tidak harus dengan uang tapi bisa dengan ikan hasil tangkapan. Satu armada bernilai 150 juta rupiah, jika dicicil dengan lancar kurang lebih bisa lunas dalam 2 tahun.

Sistem Pemasaran Digital dengan Skema *Marketplace*

Iklan yang paling sederhana untuk mengenalkan teri adalah melalui media sosial, ungkap Klemens. Ia memulai iklan awalnya lewat Facebook, dengan memperkenalkan bahwa di desa Hadakewa ada potensi teri. “Saya tidak mau *image* NTT tertinggal, bahwa hanya Tuhan yang bisa tolong. Jadi awalnya produk ini saya perkenalkan lewat Facebook. Di tahun 2017 kami sudah punya *website* desa” cerita Klemens. Menurutnya pemasaran produk secara digital melalui media sosial ataupun *website* dapat membangun kepercayaan pembeli, terlebih jika diposting di *marketplace*. Atas dasar itu pula teri Hadakewa mulai dipasarkan di *platform* Tokopedia dan Shopee. *Marketplace* ini sebagai gate, pintu masuk untuk menunjukkan bahwa produk ini ada. Dalam perjalanannya, Kementerian Desa lalu mengenal *website* Hadakewa kemudian diliput juga oleh media CNN.

BUMDes Tujuh Maret berhasil merebut pasar potensial berbasis aplikasi digital untuk perdagangan secara daring sehingga jangkauan pemasaran menjadi lebih luas tidak terbatas pada wilayah NTT tapi sampai ke ke kota-kota besar di Indonesia. Kini BUMDes Tujuh Maret sudah memiliki *reseller* di Jakarta.

Melalui digitalisasi ini Tujuh Maret mulai dikenal. Bukan hanya teri tapi juga desa, kabupaten dan potensi yang dimiliki. Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Hadakewa dan Tujuh Maret kemudian dikenal karena digitalisasi ini.

Proses pengolahan teri dari hulu hingga hilir, dari awal hingga akhir semua melibatkan masyarakat. Nelayan menjual ikan ke BUMDes, ibu-ibu mencuci kemudian menjemur ikannya dan dibayar berdasarkan kuota. Misalnya dalam sehari ada 200 kg maka nilai jemuurnya adalah 200 ribu rupiah, setelah kering kemudian disortir. Di Hadakewa ada 7 jenis teri. Nilai sortir juga dibayar per kilogram kemudian dikemas. Ada nilai uang di setiap rantai proses pengolahannya untuk menjadi pendapatan bagi mama-mama.

BUMDes yang telah memiliki 3 armada kapal penangkap, masing-masing mempekerjakan 5 orang kepala keluarga. Ditambah dengan ibu-ibu yang bekerja di darat mengolah ikan teri, total kurang lebih bisa menyerap 30 tenaga kerja. Sebanyak 30 warga terserap dalam BUMDes dari 1.050 merupakan awal yang cukup baik. Harapannya di masa depan bisa lebih banyak lagi.

Sebelumnya 75% kepemilikan kapal di Hadakewa oleh orang luar desa. Masyarakat desa hanya jadi pekerja saja, bukan pemilik atau bos. Dengan 3 armada yang diadakan oleh BUMDes

“Produk kami bisa bersaing dengan teri Medan. Selama ini *reseller* kami di Jakarta hanya mengenal teri Medan. Namun seiring diperkenalkannya teri Hadakewa yang memiliki keunggulan rasa yang tidak terlalu asin dan juga tidak tawar serta 100% tidak mengandung pengawet perlahan mereka mulai beralih ke produk kami” cerita Klemens.

Pemasaran produk unggulan BUMDes Tujuh Maret berupa 7 varian ikan teri dengan sistem digital berupa toko *online* disertai dengan fitur Whatsapp yang dapat menghubungkan langsung pembeli dengan pihak BUMDes. Dengan melakukan pemasaran *online*, BUMDes dapat terhubung langsung sehingga memudahkan komunikasi serta membina jaringan dan menumbuhkan kepercayaan konsumen.

Digitalisasi BUMDes ini dilakukan pihak desa Hadakewa bekerja sama dan dengan pendampingan langsung oleh Kementerian Desa PDTT melalui pemanfaatan dana desa.

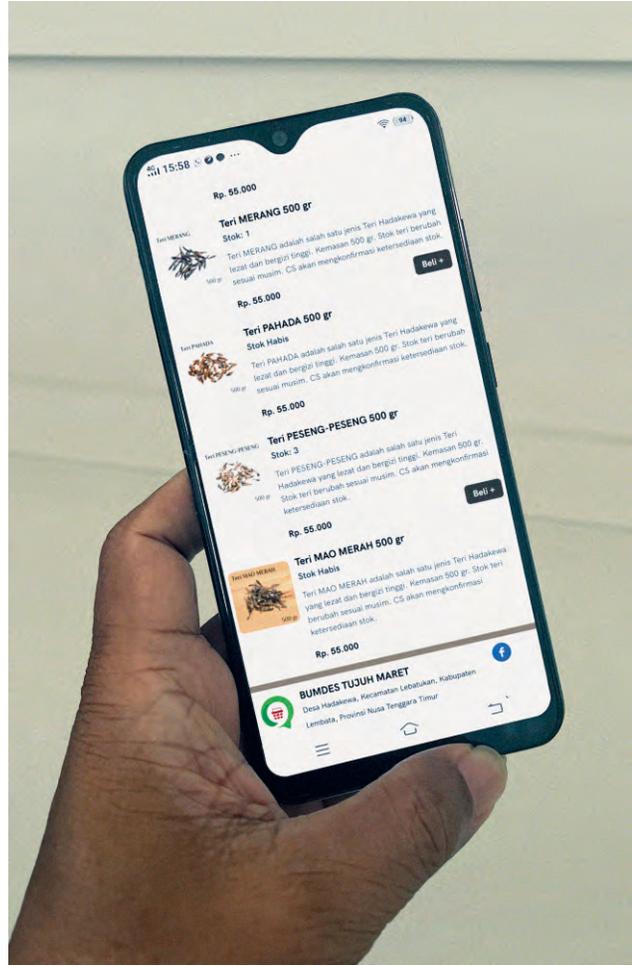
Dukungan Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Nasional

Berjalan sendiri akan jauh, tapi akan lebih jauh lagi kalau berjalan bersama. Hadakewa dan BUMDes Tujuh Maret aktif berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten, provinsi dan nasional. Setelah memperkenalkan teri, setiap tahun Hadakewa mendapat anggaran sebesar Rp200.000.000 dari kabupaten. Anggaran ini merupakan anggaran tematik karena desa Hadakewa dipandang sebagai desa yang cepat tumbuh, dan akan memengaruhi desa-desa di sekitarnya. Tahun 2020 adalah tahun ke 2 menerima dana tematik ini sebagai dana pengembangan. Dari pemerintah provinsi khususnya dari dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) dan Dinas Sosial juga memberikan bantuan di tahun 2021 ini.

Dari pemerintah nasional sendiri yakni Kementerian Desa, memberikan kesempatan kepada Klemens Kwaman mewakili 3,200 kepala desa se NTT untuk belajar ke India mengikuti kegiatan *benchmarking* di tahun 2019 lalu.

Dampak Ekonomi

Usaha ikan teri Hadakewa memberi peluang



kerja dan sumber pendapatan bagi warga, yang menjawab kesulitan ekonomi warga sebelumnya. Setiap rantai proses pengerjaan usaha ikan teri dikerjakan masyarakat Hadakewa sendiri. Mulai dari bagian penjemuran, sortir hingga pengemasan dikerjakan oleh mama-mama.

Setiap tahapan pekerjaan produksi ikan teri Hadakewa memiliki nilai uang yang menjadi sumber pendapatan bagi warga pekerja yang berjumlah berkisar 20-30 orang. Semua warga ikut mengambil bagian dalam pekerjaan produksi ikan teri Hadakewa sehingga dampak ekonominya juga benar-benar dirasakan masyarakat.

Yang paling terdampak dalam kegiatan BUMDes tentunya adalah bapak-bapak nelayan dan mama-mama. Di mana Bapak berperan sebagai nelayan yang menyuplai teri, dan mama-mama bagian pengolahan. Proses dari awal sampai akhir dilakukan oleh masyarakat, pengurus BUMDes hanya memastikan proses berjalan lancar.

“Memperkuat BUMDes dengan mimpi bahwa suatu hari kami tidak perlu mengharap dana



(kiri) Laman belanja *online* BUMDES Tujuh Maret yang menjual produk teri kering (kanan atas) Café Pantai Hadakewa yang dikelola oleh unit bisnis desa (kanan bawah) Wisata air, *banana boat* di desa Hadakewa.

Sumber foto: Tangkapan layar Youtube/**BUMDES Tujuh Maret Desa Hadakewa**



bantuan lagi dari kabupaten, provinsi atau pusat karena kami memiliki kemampuan, modal di dalam desa sehingga kami mampu membangun desa dengan kekuatan kami sendiri” tekad Klemens.

Pengembangan Unit Usaha Pariwisata dan Kuliner

Potensi lain desa Hadakewa yang terletak di pinggir pantai tentunya adalah pemandangan yang indah serta hasil lautnya. Potensi pariwisata ini mulai direncanakan pengembangannya di tahun 2020. Karena usaha teri dipandang sudah cukup kuat, maka di tanggal 14 Februari 2021 unit usaha pariwisata diluncurkan di pantai Hadakewa.

Kehadiran unit bisnis pariwisata ini tentunya berdampak baik buat masyarakat karena mampu menyerap tenaga kerja kurang lebih 25 orang dengan penghasilan rata-rata 1 juta rupiah per bulan. Ikan hasil tangkapan nelayan juga bisa dipasarkan di sini dengan menyajikannya sebagai menu di restoran pantai, tentunya dengan harga yang baik. Pantai Hadakewa selain dilengkapi

restoran, juga terdapat fasilitas *café* kapal, *banana boat*, *camping ground*, kayak dan SUP (*Stand Up Paddleboard*-papan dayung berdiri).

Prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2022 adalah Pengembangan Desa Wisata untuk pertumbuhan ekonomi desa agar dapat merata. Pengembangan unit usaha pariwisata ini mendapat bantuan keuangan dari Gubernur NTT melalui Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa) provinsi sebesar tak kurang dari 85 juta rupiah.

Banyak rencana dan harapan baik yang dicita-citakan Klemens Kwaman bersama aparat desa dan pengurus BUMDes untuk Hadakewa ke depan, terlebih karena dalam pemilihan kepala desa baru-baru ini ia kembali diberi kepercayaan untuk menahkodai kapal Hadakewa 5 tahun kedepan.

“Bicara BUMDes bukan hanya tentang profit dari segi keuntungan rupiah tapi juga *benefit* atau nilai manfaat bagi masyarakat. Saya masih tetap bermimpi bahwa BUMDes ini akan dapat bersaing dengan BUMDes yang ada di Jawa atau Sulawesi” cita-cita Klemens.

Memilih teri bukan hanya persoalan menjual produk unggulan desa, tetapi juga tentang bagaimana memberi *branding* atau identitas kepada desa Hadakewa bahwa ada hal unik lain, potensi, keunggulan yang bisa dikembangkan dan dikerjakan bersama dan menjadi sebuah kebanggaan.

Untuk mengembangkan BUMDes dibutuhkan terobosan-terobosan dan inovasi kekinian sebagai alternatif pengembangan menuju kesejahteraan, salah satunya dengan penggunaan teknologi seperti yang dilakukan BUMDes Tujuh Maret dengan BUMDes *onlinenya*.

Saatnya membangun desa dari desa melalui BUMDes.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Selengkapnya tentang BUMDes Tujuh Maret dan Desa Hadakewa dapat Anda simak melalui: <https://www.instagram.com/infobakti/channel>



TEKAD BERSINERGI ITU BERMULA DI DISTRIK KAIMANA

Oleh **HALIA ASRIYANI**

Dibu-ibu hamil dan balita-balita di kampung itu jarang sekali periksa mereka punya kesehatan. Padahal ini penting sekali. Seringnya datang pas sudah ada masalah, ibu hamil sudah anemia atau anak-anak sudah kurang gizi, su terlambat sudah untuk dicegah. Kepala-kepala kampung mesti perhatikan ini karena ini kitong punya masyarakat sendiri.” Ungkap Darius Nauseny, Kepala Puskesmas Lobo.



Foto: Dok.KOMPAK-LANDASAN II

“Kalau begitu kampung bisa lakukan apa untuk atasi masalah kita punya warga ini?” Tanya Simeon Mudeheru, Kepala Kampung Trihora.

“Karena dana Puskesmas terbatas, kampung bisa anggarkan kah pemberian makanan tambahan untuk anak-anak kurang gizi di kampung? Nanti kami yang jalankan teknisnya. Selain itu kampung juga bisa sama-sama dengan kami kasih sosialisasi ibu-ibu hamil wajib periksa rutin, sama anak-anak juga wajib dibawa ke posyandu setiap bulan. Kalau kitong bisa kerja sama begini terus, nanti anak-anak gizi kurang

tidak ada lagi di Distrik Kaimana.” Jawab Darius.

Demikianlah sekilas kutipan diskusi antara kampung dengan puskesmas dalam simulasi musyawarah kampung yang berlangsung di Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Papua Barat. Simulasi musyawarah kampung ini dilakukan dalam Forum Pembangunan Kampung melalui Sistem Administrasi dan Informasi Kampung (SAIK+) dan Sinergi Perencanaan. Pada kegiatan ini, sejumlah 17 kampung yang ada di Distrik Kaimana bersama dengan 2 puskesmas dan 16 sekolah berlatih menyusun perencanaan mereka dengan saling bersinergi.

Sejak tahun 2017, Distrik Kaimana menjadi salah satu wilayah dampingan program KOMPAK-LANDASAN. Dua program utama KOMPAK-LANDASAN yaitu Sistem Administrasi dan Informasi Kampung (SAIK+) dan Sinergi Perencanaan pun telah diperkenalkan di Distrik Kaimana. Seluruh kampung di Distrik Kaimana pun menjadi target program SAIK+. SAIK+ adalah sebuah sistem informasi kampung yang memuat data sosial dan ekonomi seluruh penduduk. Dengan SAIK+, perencanaan berbasis data pun dapat dilakukan. Dimulai dengan menganalisa masalah berdasarkan data yang ada, hingga menemukan solusi atas masalah dan menentukan kegiatan untuk menyelesaikan masalah. Sejumlah wilayah di Distrik Kaimana pun telah menyelesaikan pendataan SAIK+ dan mulai dapat memanfaatkan data SAIK+ untuk berbagai kebutuhan.

Selain SAIK+, Distrik Kaimana juga menjadi wilayah percontohan untuk program Sinergi Perencanaan oleh KOMPAK-LANDASAN. Sejumlah dua kampung di Distrik Kaimana yaitu Kampung Marsi dan Kampung Foroma Jaya pun telah dilatih dan didampingi dalam penyusunan perencanaan dengan bersinergi bersama unit layanan dasar kesehatan dan pendidikan yang ada di kampung tersebut. Melalui sinergi perencanaan, lahir sejumlah program untuk mengatasi berbagai permasalahan kesehatan dan pendidikan di kampung. Kampung dan unit layanan masing-masing mengambil peran yang dapat mereka lakukan untuk mengatasi masalah sehingga permasalahan yang sama tidak terus berulang dikarenakan program kegiatan yang tidak sejalan dengan kondisi yang ada.



Foto: Dok.KOMPAK-LANDASAN II

Proses ini diyakini dan terbukti dapat membantu mengatasi sejumlah permasalahan dengan lebih efektif. Hal tersebut tampak dari hasil Monitoring Evaluasi Kegiatan Sinergi Perencanaan oleh distrik yang juga didampingi oleh KOMPAK-LANDASAN. Proses monitoring ini dilakukan sebagai tahap lanjut setelah perencanaan. Tujuannya untuk mengukur kemajuan dari pelaksanaan rencana serta memaksimalkan implementasi dan pencapaian output atas rencana tersebut ke depannya. Melalui hasil monitoring tahap pertama yang telah dilakukan, kampung dan unit layanan pun telah berupaya menjalankan program yang mereka susun bersama-sama. Misalnya yang terjadi di Kampung Marsi, kampung mendanai kebutuhan pengadaan alat-alat kesehatan di Pustu Kampung Marsi. Selain itu, juga menganggarkan pembelian buku pelajaran bagi siswa SD YPK Sisir I. Dengan demikian penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar bagi warga Kampung Marsi pun dapat berjalan maksimal.

Penyelenggaraan SAIK+ dan Sinergi perencanaan di atas yang telah berjalan dan membuahkan hasil kemudian mendorong

keinginan dari pemerintah Distrik Kaimana untuk menerapkan model yang sama di seluruh kampung dan kelurahan dalam wilayah Distrik Kaimana. Adalah Sachril Kamakaula, Kepala Distrik Kaimana yang menginisiasi diselenggarakannya kegiatan ini. Beliau adalah yang mengumpulkan para kepala kampung bersama dengan unit layanan di wilayahnya untuk berlatih menyusun perencanaan secara bersinergi dan dengan berbasis data.

“Proses ini diharapkan menjadi momentum penting bagi seluruh kampung dalam wilayah Distrik Kaimana untuk menyiapkan perencanaan tahun 2022 berbasis data yang dihasilkan dari pendataan SAIK+ dengan menerapkan sinergi perencanaan bersama unit layanan.” Ungkap Sachril.

Berlangsung pada 16-19 November 2021, para peserta memperoleh penambahan kapasitas tentang tata cara menyiapkan data SAIK+ mulai dari mempraktikkan proses wawancara hingga pengisian form data SAIK+ dan menginputnya ke dalam aplikasi SAIK+. Tidak hanya itu, para peserta juga belajar cara mengelola dan memanfaatkan data SAIK+ untuk berbagai



Foto: Dok.KOMPAK-LANDASAN II

kebutuhan, salah satunya untuk menyusun perencanaan di kampung maupun unit layanan.

Untuk sinergi perencanaan sendiri, para peserta dibagi ke dalam kelompok sektor yaitu kampung, kesehatan dan pendidikan untuk melakukan analisa kondisi dan pemetaan masalah yang ada di sektor masing-masing. Selanjutnya mereka menentukan alternatif solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada hingga kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Setelah semua sektor selesai, selanjutnya dilakukan simulasi musyawarah kampung di mana seluruh sektor bergabung. Pada momen inilah sektor kesehatan dan pendidikan yaitu puskesmas dan sekolah memaparkan permasalahan kesehatan dan pendidikan yang ada di kampung. Masing-masing dari mereka menyampaikan permasalahan yang dihadapi serta kegiatan yang akan mereka lakukan untuk mengatasi permasalahan. Selain itu mereka juga menyampaikan kegiatan yang mereka harapkan dilakukan oleh kampung guna bersinergi memecahkan permasalahan kesehatan dan pendidikan di kampung bersama unit layanan.

Selanjutnya akan disepakati solusi bersama antara kampung dan unit layanan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

“Kalau semua kampung dan unit layanan bisa bersinergi seperti ini, yakin permasalahan-permasalahan di kampung yang terus berulang tiap tahunnya ini bisa teratasi dengan baik. Saya lihat semua kampung dan unit layanan sudah mulai terbuka dalam forum musyawarah kampung. Semua memaparkan permasalahannya dan mencari solusinya bersama-sama. Saya berharap model seperti inilah yang akan diterapkan ke depannya oleh semua kampung.” Ungkap Philipus Warwey dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Kaimana yang turut hadir mendampingi jalannya proses ini.

“Kalau begitu, sebelum Musrenbang di distrik, kita semua kampung sudah lakukan proses ini dulu. Kita bertemu bersama puskesmas dan sekolah untuk susun rencana kampung. Tidak ada lagi yang namanya kita bikin rencana asal-asalan yang tidak tahu dari mana datangnya.” Ujar Obeth Ons, Kepala Kampung Maimai.



Foto: Dok.KOMPAK-LANDASAN II

Kegiatan ini ditutup dengan rencana tindak lanjut berupa komitmen dari semua kampung untuk merampungkan seluruh pendataan SAIK+ pada akhir tahun 2021. Selain itu, semua kampung juga berkomitmen untuk menyusun perencanaan mereka pada tahun berikutnya dengan bersinergi bersama puskesmas dan sekolah. Seluruh kampung dan unit layanan pun bersepakat untuk mengadakan pertemuan evaluasi setiap enam bulan yang seluruhnya akan didanai oleh distrik.

“Kesadaran ini semua lahir dari kegiatan yang selama ini KOMPAK-LANDASAN lakukan di Distrik Kaimana. Saya mewakili semua kampung dan unit layanan sangat berterima kasih karena sudah didampingi sejauh ini sampai saya bisa paham bagaimana perencanaan yang baik dan bagaimana seharusnya saya sebagai Kepala Distrik berperan dalam pembangunan kampung. Saya sangat berharap KOMPAK-LANDASAN tidak hanya sampai di sini tapi bisa terus mendampingi kami dalam proses ini hingga semua kampung dan unit layanan sudah benar-benar menjalankan sinergi perencanaan.” Demikian

harapan Sachril untuk Distrik Kaimana yang berada di bawah kepemimpinannya.

“Lebih jauh lagi, saya berharap ini bisa menjadi model yang dibangun bukan hanya di distrik ini namun di seluruh wilayah Kabupaten Kaimana. Bermula dari Distrik Kaimana, hingga selanjutnya sinergi perencanaan ini benar-benar menjadi suatu bagian dalam sebuah sistem perencanaan dari kampung hingga kabupaten.” Tambahnya. Sebuah harapan yang sama oleh KOMPAK-LANDASAN sehingga terus bergerak memperkenalkan model sinergi perencanaan ini di delapan kabupaten di Papua dan Papua Barat. Namun tentu saja, hanya melalui tekad dan komitmen yang kuat untuk melakukan perubahanlah sehingga harapan itu bisa terwujud. Semoga semangat dari Distrik Kaimana ini terus berlipat ganda, menyebar luas di Kabupaten Kaimana hingga perlahan membawa masyarakat melangkah maju menuju perubahan yang diharapkan.

INFORMASI LEBIH LANJUT

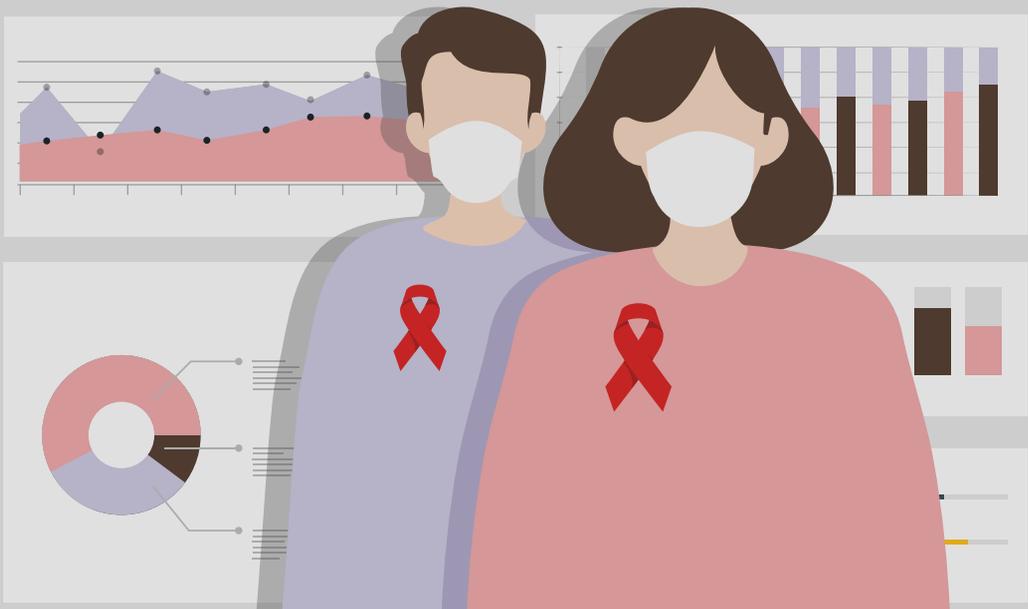
Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Program KOMPAK-LANDASAN Fase II, dapat menghubungi info@bakti.or.id

BELAJAR DARI PENDATAAN PANDEMI COVID-19 UNTUK MENGENDALIKAN HIV/AIDS DI INDONESIA

Oleh
**BENJAMIN HEGARTY, AMALIA PURI HANDAYANI,
KRISTAL SPREADBOROUGH, PRIYANKA PILLAI**

AIDS berbeda dengan virus corona dan COVID-19 dalam cara penularan, penyakit, dan patogennya.

Meski demikian, data yang akurat dan tepat waktu tetap menjadi hal penting untuk mencegah dan mengobati epidemi HIV di masyarakat. Dalam konteks, ini termasuk survei reguler yang mengevaluasi penyebaran virus dan mengetes berbagai komunitas, termasuk mereka yang tampak sehat tanpa gejala transmisi yang terlihat.



Untuk mengetahui data terbaru HIV, para pakar, aktivis dan pembuat kebijakan dapat mengunjungi *database* Kementerian Kesehatan dan menemukan laporan data HIV per kuartal.

Masalahnya, laporan ini cenderung ditampilkan dalam bentuk angka tanpa menyajikan konteks atau informasi pendukung. Misalnya, laporan kuartal pertama pada 2021 (Januari-Maret) memaparkan jumlah kasus HIV terdeteksi dan jumlah orang yang menerima pengobatan, 67% orang yang hidup dengan HIV tahu statusnya dan 27% orang rutin berobat.

Kami melihat bahwa sistem pengumpulan data program HIV di Indonesia, termasuk surveilans, monitoring, dan evaluasi memenuhi target konkrit dan bermanfaat di level internasional, namun tidak begitu bermanfaat bagi komunitas sipil yang lebih luas.

Monitoring HIV Berbasis Data di Indonesia

Kita perlu belajar dari upaya mengendalikan pandemi COVID-19, bagaimana data dikumpulkan dan digunakan untuk mendeteksi kasus, mengkarantina, dan mengobati pasien. Pengumpul data tidak hanya otoritas kesehatan dan pemerintah seperti COVID19.go.id, tapi juga masyarakat sipil seperti KawalCOVID19 dan LaporCOVID.

KawalCOVID19 menunjukkan informasi terkini (pada waktu yang sebenarnya) terkait jumlah kasus, lokasi kasus, angka kematian, angka kesembuhan, status vaksinasi, peringatan kasus, dan lokasi rumah sakit. Sementara Lapor COVID-19 merupakan *platform* berbagi informasi tentang insiden terkait COVID-19 yang ditemukan oleh publik yang luput dari jangkauan pemerintah. Portal-portal ini juga mengumpulkan sumber terpercaya yang berisi informasi tentang pandemi dan mematahkan informasi keliru yang berkeliaran di antara komunitas.

Dalam kasus COVID-19, data digunakan untuk mengilustrasikan informasi pandemi yang relatif akurat dan tepat waktu. Data yang ditampilkan dalam dan KawalCOVID-19 dan LaporCOVID-19, misalnya, mendukung anjuran pelaksanaan tes yang semakin mudah diakses bagi komunitas rentan.

Dalam kasus HIV, organisasi berbasis komunitas dan akademisi juga telah berupaya

untuk menyajikan informasi yang akurat dan tepat waktu. Namun, tantangan yang dihadapi terkait data yang tidak mudah diakses atau justru mudah disalahartikan. Pengunjung laman dilihat sebagai pakar, bukan orang awam. Informasi dalam bentuk PDF yang disajikan untuk memberi tahu tentang pemenuhan target pendataan HIV, bukan sebagai informasi publik.

Ketiadaan konteks dalam data HIV dapat menggiring pemahaman yang keliru dan—terburuknya—mempertebal diskriminasi bagi pengidap HIV. Meski ada upaya dari kampanye dan organisasi berbasis komunitas dalam menyediakan informasi relevan dan terkini, pihak media massa kerap mempublikasikan data HIV dengan sangat selektif.

Alhasil, terjadi kesalahan informasi dan peningkatan diskriminasi terhadap orang yang hidup dengan HIV dan populasi kunci.

Sebagai contoh, keterbatasan data digunakan untuk pembuatan kebijakan terkait wajib tes, alih-alih menggunakan metode berbasis bukti yang lebih berperspektif hak asasi manusia dan atau berdasarkan pengalaman populasi kunci.

Data HIV yang akurat dapat mendukung berkembangnya inisiatif penting, khususnya bagi populasi kunci yang mengikutsertakan pengguna jarum suntik, laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki, transgender, pekerja seks, dan orang-orang yang berada di dalam penjara. Kelompok ini menghadapi tingkat kerentanan dan diskriminasi yang lebih tinggi daripada kelompok lain dalam masyarakat.

Informasi semacam itu, tanpa dilengkapi dengan konteks atau keterangan lebih lanjut terkait HIV, bisa berdampak pada pemahaman yang kurang akurat.

Pandemi COVID-19 menunjukkan nilai keterlibatan warga dalam memahami sains di belakang deretan angka. Proses pengumpulan data tentang HIV bisa belajar dari pengalaman itu yang kemudian diharapkan dapat berkontribusi dalam pemahaman menyeluruh terhadap epidemi dan mereka yang paling terdampak.

Maka itu, data dapat menjadi cara yang berguna bagi mereka agar bisa dilihat dan diakui untuk menerima dukungan.

Pendekatan Berbasis Data untuk Epidemio dan Pandemi

Pandemi COVID-19 bukan pandemi virus pertama yang dihadapi masyarakat Indonesia.

Pada 1987, otoritas kesehatan secara resmi menyatakan ada kasus HIV pertama di Bali, meski kemungkinan besar virus sudah beredar tanpa terdeteksi selama bertahun-tahun sebelumnya. Para perintis — mulai dari dokter, epidemiologis, sampai aktivis — bekerja mengembangkan diagnosis dan pelaporan data HIV yang efektif.

Pada 2003, perawatan pertama tersedia secara luas di Indonesia, enam tahun setelah obat HIV, *highly active antiretroviral therapy* (HAART), tersedia secara luas di Amerika Serikat. Sejak saat itu, terapi antiretroviral yang aman dan efektif telah menyelamatkan kehidupan jutaan orang Indonesia yang hidup dengan HIV.

Walau penyakit yang disebabkan virus dan sejarah pandemi berbeda, seperti pengendalian COVID-19, kebijakan efektif untuk mengatasi HIV memerlukan data tepat waktu dan otoritatif yang bisa disajikan dengan cara yang mudah dipahami orang awam.

Selama bertahun-tahun, model berbasis data HIV yang disebut kaskade perawatan atau “*cascade of care*” semakin mengemuka dalam kebijakan internasional dan pendanaan. Kaskade menggunakan pendekatan 90-90-90. Maksudnya, 90% orang yang hidup dengan HIV mengetahui statusnya, 90% orang yang tahu status memulai pengobatan, dan 90% orang yang menggunakan obat akan mengurangi jumlah virus sehingga tidak terdeteksi dan mengurangi kemungkinan penularan. Ini disebut “*treatment as prevention*.”

Pendekatan 90-90-90 menekankan terpenuhinya target berdasarkan metrik yang menjadi persyaratan dari pemerintah dan lembaga. Pendekatan ini tidak menekankan penggunaan data oleh komunitas dan individu. Data yang digunakan untuk mengukur perkembangan target, tapi tidak mempertimbangkan kesehatan dan kesejahteraan komunitas sendiri, sebagai akibat dari HIV.

Langkah pemerintah Indonesia mengutamakan “Temukan-Obati-Pertahankan (TOP)” dan menyusun pengumpulan data serta laporan terkait kerangka HIV sebagai kerja

biomedis murni tampaknya gagal mempertimbangkan faktor individu dan sosial yang berkontribusi dalam “mengakhiri AIDS.” HIV disebut sebagai tantangan biomedis melalui laporan dan target.

Benar bahwa pengumpulan data merupakan mekanisme untuk mengukur perkembangan dalam pencapaian target secara transparan, tapi tanpa konteks yang jelas dapat menciptakan narasi keliru terkait tujuan utama pendataan kasus HIV.

Rekomendasi

Pengumpulan data HIV, seperti KawalCOVID19 dan LaporanCOVID-19, bisa dilakukan secara lebih kolaboratif, melibatkan warga dan pakar bersama-sama agar dapat lebih memahami bagaimana data dikumpulkan dan apa tujuan pengumpulannya.

Analisis data HIV juga dapat menyesuaikan kondisi lapangan sehingga dapat memperkuat respons di tingkat nasional dan mendukung pembuatan kebijakan dengan menyajikan bukti ilmiah.

Kementerian Kesehatan perlu menyajikan data HIV/AIDS secara terbuka, seperti data COVID-19 disajikan dengan tampilan yang ramah pengunjung. Pemerintah harus menyajikan data HIV juga untuk kepentingan publik, bukan menunjukkan pemenuhan target semata.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Benjamin Hegarty terafiliasi dengan University of Melbourne dan PUI-PT PPH Pusat Unggulan Kebijakan Kesehatan dan Inovasi Sosial, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya (PUI-PT PPH PUK2IS UAJ). Dia menerima dana dari the University of Melbourne dari skema McKenzie Fellowship dan Melbourne Data Analytic Platform.

Amalia Handayani terafiliasi dengan PUI-PT PPH Pusat Unggulan Kebijakan Kesehatan dan Inovasi Sosial, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya (PUI-PT PPH PUK2IS UAJ).

Kristal Spreadborough dan **Priyanka Pillai** tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.

Artikel bersumber dari:

<https://theconversation.com/belajar-dari-pendataan-pandemi-covid-19-untuk-mengendalikan-hiv-aids-di-indonesia-172862>

MEMPERTANYAKAN KESIAPAN POLISI TANGANI KASUS KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA



Idealnya, polisi menjadi garda terdepan penegakan hukum yang membantu korban kekerasan seksual mendapatkan hak-haknya. Namun, realitasnya masih kerap jauh dari harapan ini.

Oleh **ARSA ILMI BUDIARTI**

Baru-baru ini, sebuah berita tentang pemerkosaan tiga anak di Luwu Timur, Sulawesi Selatan yang dirilis *Project Multatuli* viral di media sosial. Reportase ini menggambarkan perjalanan seorang ibu yang berupaya untuk mencari keadilan bagi ketiga anaknya dengan melaporkan kasus tersebut ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan Kepolisian Resor Luwu Timur hingga Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Namun, upaya tersebut tidak membuahkan hasil dan bahkan melalui proses yang sangat menyedihkan.

Kisah ini kemudian memunculkan berbagai respons dari masyarakat yang diikuti dengan ramainya tagar #PercumaLaporPolisi di berbagai *platform* media sosial. Kesaksian-kesaksian yang muncul dengan tagar tersebut menggambarkan ketidakpuasan, kekecewaan, dan ketidakpercayaan masyarakat ketika berurusan dengan polisi dalam berbagai perkara termasuk kasus kekerasan seksual.

(Tidak) Melaporkan Kekerasan Seksual

Ramainya #PercumaLaporPolisi menunjukkan ada anggapan di masyarakat bahwa urusan melaporkan masalah hukum kepada lembaga negara bukan hal yang mudah dilakukan.

Temuan penelitian mengonfirmasi hal ini. Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia tahun 2019 menunjukkan bahwa 38% masyarakat Indonesia yang mengalami masalah hukum memilih untuk tidak melakukan apapun terhadap masalah hukumnya. Mereka khawatir dan takut jika melapor, masalah yang mereka hadapi akan menjadi lebih rumit.

Menariknya, sebagian besar masyarakat (60,5%) yang mau melaporkan masalah hukumnya, justru memilih untuk melapor ke lembaga non-negara atau ke mekanisme informal seperti ke keluarga atau ke pengurus Rukun Tetangga, Rukun Warga, atau desa, kelurahan setempat. Studi tersebut juga menemukan bahwa sebagian besar (52%) anggota masyarakat yang enggan melakukan apapun terhadap masalah hukumnya tersebut adalah perempuan.

Temuan ini dikuatkan oleh hasil Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender dari International NGO Forum Indonesia (INFID) dan Indonesia Judicial Research Society (IJRS) pada 2020 yang menunjukkan bahwa 57,3% responden

MAGDOLENE

dengan pengalaman kekerasan seksual — yang mayoritas adalah perempuan — memutuskan untuk tidak melaporkan perkara kekerasan seksual yang dialami. Alasan mereka beragam, mulai dari takut, malu, hingga tidak tahu harus melapor kemana.

Sebagian besar responden (57%) yang mengalami kekerasan seksual mengatakan pada akhirnya tidak memperoleh penyelesaian dalam masalah yang mereka alami. Jika pun ada penyelesaian, hasil yang didapat tidak mengutamakan kepentingan terbaik korban. Contohnya, korban masih harus membayar sejumlah uang hingga dinikahkan dengan pelaku kekerasan seksual.

Di sisi lain, ada hambatan dari sisi penegak hukum. Mayoritas responden menganggap penanganan aparat penegak hukum terhadap perkara kekerasan seksual itu cenderung responsif. Namun, responden yang menjawab demikian adalah mereka belum pernah mengalami kekerasan seksual. Sebaliknya, mayoritas responden yang beranggapan aparat tidak responsif adalah mereka pernah mengalami kekerasan seksual.

Polisi di Garda Terdepan

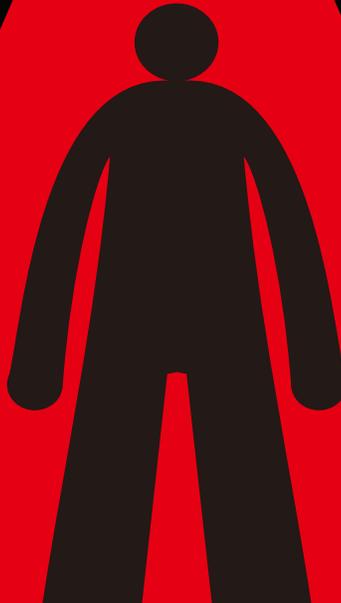
Di sisi lain, riset yang sama menunjukkan bahwa 43,8% responden yang tahu harus melapor ke mana ketika mengalami kekerasan seksual akhirnya lebih memilih untuk melapor ke polisi apabila mereka mengalami kekerasan seksual.

Bahkan, temuan Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia tahun 2019 juga menunjukkan bahwa secara umum (72,1%) masyarakat percaya kepada kepolisian untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dialami.

Ini menunjukkan bahwa di satu sisi, ada harapan dan ekspektasi besar dari masyarakat terhadap kepolisian. Namun, di sisi lain bisa saja masyarakat sebetulnya tidak punya pilihan lain untuk melaporkan perkara kekerasan seksual yang dialaminya.

Kantor-kantor polisi tersebar hingga level administratif paling bawah untuk memudahkan masyarakat untuk membuat pelaporan masalah hukum. Karenanya, dapat dikatakan bahwa kepolisian merupakan garda terdepan dalam pelaporan kekerasan seksual.

Sayangnya, mekanisme pelaporan yang telah disediakan oleh kepolisian untuk penanganan kekerasan seksual belum didukung adanya perspektif perlindungan korban yang baik dari beberapa anggota polisi. Alih-alih memperoleh perlindungan dan bantuan, saat melaporkan kekerasan seksual yang dialami, para korban justru mengalami menjadi korban kembali (reviktimisasi) serta harus menghadapi pertanyaan yang seringkali menyudutkan, tidak empati, hingga melecehkan.



Selain itu, tidak hanya polisi, aparat penegak hukum secara umum cenderung abai terhadap kondisi psikologis korban yang menyebabkan korban kekerasan seksual harus menghadapi proses hukum yang panjang dengan perilaku aparat yang tidak empatik. Wajar bila para korban memutuskan untuk mengandalkan mekanisme informal atau pihak-pihak di luar negara untuk penyelesaian permasalahan hukumnya.

Maka menjadi pertanyaan, apakah polisi dapat benar-benar siap menjadi garda terdepan pelaporan perkara kekerasan seksual?

Menyiapkan Polisi

Ketika terdapat korban kekerasan seksual yang melapor, petugas polisi seharusnya menciptakan suasana yang kondusif dan nyaman bagi korban untuk menceritakan masalahnya. Polisi seharusnya memastikan keberadaan pendamping korban, jaminan keselamatan korban, adanya pernyataan atau pertanyaan yang tidak menghakimi dan menghargai korban hingga jaminan terwujudnya akses keadilan.

Ini bukan sesuatu yang baru; semua poin ini telah tercantum dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 3 tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana yang dikhususkan untuk perempuan dan anak.

Selain itu, langkah-langkah untuk memastikan perlindungan korban perempuan dan anak juga telah ditetapkan dalam berbagai peraturan seperti Undang-Undang (UU) No. 31 Tahun 2014 dan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan terhadap UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Polisi sebagai aparat hukum negara perlu menelaah kembali dan menerapkan prinsip-prinsip perlindungan korban, perempuan, dan anak sesuai berbagai UU tersebut ketika menangani pelaporan perkara kekerasan seksual.

Selain itu, dalam mekanisme pelaporan kekerasan seksual, secara lebih khusus, polisi perlu juga memperhatikan kondisi fisik, psikis maupun kebutuhan pemulihan korban. Ini dapat dilakukan dengan memastikan adanya penasihat/pendamping hukum, pendamping psikologis hingga pendamping sosial bagi korban.

Untuk memahami kondisi-kondisi tersebut, polisi dapat meminta rekomendasi atau mendorong adanya peran dari pemangku kepentingan lain seperti psikolog, dokter, pekerja sosial, maupun pendamping di penyedia layanan setempat.

Hal-hal ini dapat berimplikasi pada proses penyelesaian perkara secara keseluruhan. Langkah-langkah ini dapat dan telah dilakukan oleh aparat penegak hukum lain sehingga hal ini juga sangat mungkin dilakukan oleh polisi.

Berbagai tindakan polisi yang tidak empatik, diskriminatif, dan tidak melindungi korban masih kerap dilaporkan. Maka peningkatan kapasitas secara mendalam dan komprehensif tentang penanganan perkara yang melibatkan perempuan dan anak masih perlu dan harus terus dilakukan baik kepada calon anggota polisi maupun polisi yang telah bertugas.

Yang juga tidak kalah penting adalah penguatan di sektor non-negara, mengingat terdapat kecenderungan yang tinggi dari masyarakat dalam melaporkan masalah hukum ke pihak-pihak di luar negara. Penguatan tokoh atau aktor yang dipercaya masyarakat dapat diberikan untuk menerima, merespons atau bahkan meneruskan pelaporan masalah hukum. Dalam perkara kekerasan seksual di mana korban yang takut dan malu untuk melapor, peran pihak-pihak yang dipercaya inilah yang dapat mendorong akses terhadap keadilan yang lebih luas.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah peneliti pada Indonesia Judicial Research Society.

Artikel bersumber dari:

<https://www.magdalene.co/story/bagaimana-polisi-tangani-kasus-kekerasan-seksual>

FORUM
KEPALA BAPPEDA PROVINSI
SE-KAWASAN TIMUR
INDONESIA

PENYUSUNAN KEBIJAKAN BERBASIS PENGETAHUAN

Program rintisan penyusunan kebijakan berbasis pengetahuan di Sulawesi Selatan dilaksanakan sejak Desember 2019 melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Sulawesi Selatan yang bekerja sama dengan Yayasan BaKTI dengan dukungan dari program kerja sama pemerintah Indonesia dan Australia, Knowledge Sector Initiative (KSI). Program rintisan ini berhasil menunjukkan sebuah siklus penyusunan kebijakan berbasis bukti, di mana suatu agenda kebijakan prioritas daerah yang didukung melalui sebuah kajian terapan telah menjadi dasar penyusunan suatu kebijakan.

Sebagai organisasi yang fokus pada pertukaran pengetahuan, Yayasan BaKTI melalui Sekretariat Forum Kawasan Timur Indonesia berbagi pembelajaran serta praktik baik dari pelaksanaan program rintisan penyusunan kebijakan berbasis pengetahuan di Sulawesi Selatan melalui pertemuan Forum Kepala Bappeda Provinsi se Kawasan Timur Indonesia, pada tanggal 9 Desember 2021 secara daring. Forum Kepala Bappeda Provinsi Se-KTI terdiri atas Kepala Bappeda Provinsi dari dua belas



provinsi di KTI. Forum ini berfokus pada usaha peningkatan koordinasi pembangunan antar-pemerintah provinsi juga antara pemerintah provinsi dan pemerintah nasional, serta untuk berbagi pengetahuan dan praktik baik khususnya dalam bidang perencanaan pembangunan. Forum ini dapat menjadi salah satu wadah pertukaran pengetahuan agar para pemangku kepentingan dan pelaku pembangunan di KTI, terutama yang bergerak di bidang perencanaan pembangunan daerah dapat saling belajar dan menyerap praktik baik dalam mewujudkan kebijakan berbasis pengetahuan.

Selain mengundang Bappeda provinsi se KTI, juga mengundang secara khusus bagian Kelitbangan provinsi. Beberapa provinsi di KTI, Balitbangda telah dilebur dan berada di bawah koordinasi Bappeda dan diberi nama Bappelitbangda, namun beberapa provinsi masih



menjadi organisasi yang terpisah dan atau menjadi sub bagian di bawah Bappeda.

Pertemuan ini juga dihadiri oleh akademisi, lembaga penelitian, LSM, dan mitra pembangunan internasional dengan sambutan pembukaan dari Ketua Pokja Forum KTI–Prof. Winarni Moanoarfa, Wakil Konsul Jenderal Australia di Makassar–Bapak Sam Upritchard dan Direktur Regional II BAPPENAS - Bapak Mohammad Roudo, ST, MPP, Ph.D.. “Pertemuan ini membahas serangkaian tahapan penyusunan kebijakan berbasis bukti yang telah dilaksanakan secara kolaboratif dan lintas sektor oleh universitas, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terkait dalam program rintisan”, tutur Zusanna Gosal, Deputy Direktur Yayasan BaKTI, yang telah 14 tahun mengelola Forum Kepala BAPPEDA se-KTI sebagai sebuah forum pertukaran pengetahuan

Sutra adalah salah satu komoditas yang dipilih sebagai topik dalam kajian kolaboratif ini. Kajian ini mampu mengidentifikasi kompleksitas isu tata kelola komoditas sutra di Sulawesi Selatan yang kemudian melahirkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan mengenai Labelisasi Sutra.

Sumber foto: **Yayasan BaKTI**

untuk efektivitas pembangunan kawasan timur Indonesia.

Dalam presentasi narasumber berjudul “Kolaborasi Multipihak Mewujudkan Kebijakan Berbasis Pengetahuan di Sulawesi Selatan” yang disampaikan oleh Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan Ir. A. Darmawan Bintang, MDevPlg, menekankan bagaimana pentingnya kerja sama dan melakukan uji coba dalam menyusun program kebijakan berbasis pengetahuan melalui sebuah tim kajian terapan. “Selama ini kita selalu berpikir bahwa hal-hal yang menjadi keputusan kebijakan biasanya

didasarkan pada hal-hal yang menjadi asumsi. Namun dengan kebijakan berbasis pengetahuan, tentu tidak lagi berdasarkan asumsi-asumsi tapi berdasarkan hasil kajian kolaboratif multipihak” pungkas Darmawan Bintang.

Upaya mewujudkan kebijakan berbasis bukti dan berbasis pengetahuan, diawali dengan proses *agenda setting* yang melibatkan multi pihak. Hasil *agenda setting* mengidentifikasi kompleksitas isu tata kelola komoditas Sulawesi Selatan. Solusi strategis yang disepakati para pihak adalah kajian rantai nilai komoditas, dengan memilih komoditas sutra sebagai topik kajian dengan pertimbangan sektor persuteraan di Sulawesi Selatan tengah mengalami penurunan, padahal sektor ini melekat erat pada budaya masyarakat Sulawesi Selatan dan mempunyai potensi manfaat yang luas dan beragam. Sutra pun telah menjadi salah satu sektor yang menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan Pemerintah Provinsi.

Berikutnya adalah persiapan kajian yang dengan pembentukan tim yang terdiri dari tim persiapan terdiri dari Yayasan BaKTI dan Bappelitbangda yang mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Selain itu, dalam rangka mengawasi jalannya penelitian agar tetap berada pada jalur-jalur yang telah ditetapkan dan telah disepakati sebelumnya dibentuklah Tim Pengawas dan Tim Pelaksana Kajian, Tim Pengendali Mutu (TPM) yang terdiri dari multi pihak dan multi pengetahuan merupakan gabungan dari Bappelitbangda, akademisi, dan LSM yang berperan memastikan bahwa kajian ini mempunyai kualitas sebagaimana diharapkan bersama, serta mengikuti langkah-langkah yang tertuang dalam Permendagri No. 17 Tahun 2016. Seperti ditetapkan melalui sidang TPM, sidang proposal kajian, sidang instrumen kajian, sidang hasil uji coba instrumen kajian, hingga sidang persetujuan pelaksanaan kajian.

Pada pelaksanaan kajian kolaborasi yang mengkaji beberapa aspek di antaranya ekonomi lingkungan yang berkaitan dengan lingkungan sutra tersebut, bagaimana para pekerja berkaitan dengan gender, aspek sosial yang terlibat di dalam komoditas sutra ini, kemudian kebijakan dan

kelembagaan serta kajian ini juga memikirkan bagaimana sebenarnya pemberdayaan masyarakat dalam kesuteraan yang ada di Sulawesi Selatan. Proses selanjutnya, TPM melakukan *review* kajian untuk memastikan bahwa semuanya telah sesuai dengan yang ditetapkan sebelumnya. Terakhir adalah pelaporan kajian yang ditindaklanjuti oleh pemerintah sebagai referensi dalam pengambilan keputusan kebijakan.

Proses advokasi dan formulasi kebijakan berupa Peraturan Gubernur (Pergub) Labelisasi Sutra Sulawesi Selatan berdasarkan hasil rekomendasi kajian rantai nilai sutra saat ini ditandatangani oleh Gubernur Sulawesi Selatan. Proses penyusunan dan penyempurnaan penyempurnaan oleh tim penyusun Pergub Labelisasi Sutra Sulawesi Selatan yang terdiri dari multipihak. Sebelum ditandatangani oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Ranpergub ini telah diperiksa dan ditelaah oleh Kementerian Dalam Negeri. “Penyusunan Pergub Labelisasi Sutra ini dirumuskan bersama-sama oleh tim kerja yang beranggotakan Analis Kebijakan Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, akademisi, dan dipimpin oleh Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan”, imbuhs Zusantha Gosal.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah mereplikasi kajian kolaborasi rantai nilai sutra dengan mekanisme swakelola tipe 3 dengan pelaksanaan kajian kolaborasi rantai nilai komoditas talas satoimo dengan pendanaan APBD 2021. Pengkajian dilaksanakan oleh Yayasan Pilar Nusantara (PINUS) Sulawesi Selatan dengan pendekatan kolaborasi multipihak, yaitu Pemerintah, LSM dan akademisi. Replikasi ini menambah daftar LSM di Sulawesi Selatan yang mampu menjalankan kajian kolaborasi. BaKTI terlibat aktif mendampingi proses penyusunan proposal dan persiapan, hingga pelaksanaan kajian kolaborasi.

Kemudian yang kedua formalisasi kajian kolaborasi dalam bentuk juknis, dan SOP Kelitbang Pengkajian Kolaborasi telah dihasilkan dan disahkan dengan SK Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini disadari sepenuhnya oleh Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan bahwa pendekatan pengkajian kolaborasi multipihak ini efektif.

Pendekatan dan metodologinya ideal diterapkan pada semua OPD provinsi dan dapat direplikasi oleh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Oleh sebab itu, Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan sedang menginisiasi peningkatan status hukum Kelitbang Pengkajian Kolaborasi menjadi Peraturan Gubernur. Seperti pada kajian sutra yang menghasilkan sebuah Peraturan Gubernur yang dapat menjadi acuan bagi keseluruhan instansi pemerintah adanya Peraturan Gubernur Penggunaan Label Pada Kain Motif Sutra Asli Sulawesi Selatan.

“Oleh karena sutra merupakan komoditas unggulan dan prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan maka proses kajian disepakati dengan pendekatan kolaborasi multipihak, *triple helix* antara Pemerintah, akademisi dan LSM, yang memiliki latar belakang berbagai disiplin keilmuan”, ungkap Yvonne M. Salindeho, Analis Kebijakan Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, yang menjadi salah satu anggota Tim Pelaksana Kajian Rantai Nilai Sutra. Dalam program rintisan ini, keberagaman keilmuan diadani menunjang efektivitas pengkajian yang mendalami aspek penting yang berpengaruh terhadap rantai nilai komoditas sutra, antara lain perspektif kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial (GEDSI), *livelihood* (penghidupan yang berkelanjutan)-pemberdayaan masyarakat, kebijakan dan kelembagaan, ekonomi dan lingkungan.

Hasil kajian menunjukkan beragam bukti, betapa kompleks masalah industri persuteraan alam di Sulawesi Selatan. Pada setiap rantai nilainya diidentifikasi tantangan yang berpotensi menghambat keberhasilan program 'Mengembalikan Kejayaan Sutra' yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Sebagai tindak lanjut hasil kajian rantai nilai sutra, program ini berupaya mendorong lahirnya regulasi di level provinsi sebagai upaya memastikan tata kelola industri sutra berjalan dalam koridor regulasi yang tepat.

Dalam sambutan Deputy Bidang Pengembangan Regional Bappenas yang disampaikan oleh Bapak Mohammad Roudo, ST, MPP, Ph.D, – Direktur Regional II BAPPENAS, beliau mengharapkan Forum Kepala Bappeda se-Kawasan Timur Indonesia dapat

menjadi forum berbagi pengalaman antar Bappeda dalam meningkatkan kapasitas penelitian dan inovasi daerah dengan pendekatan *policy based evidence*. Selain itu, pembelajaran kajian rantai nilai sutra di Provinsi Sulawesi Selatan ini diharapkan dapat di replikasi kembali baik bagi Provinsi Sulawesi Selatan di sektor lain, dan ini juga sudah dilakukan beberapa inisiasi maupun di Provinsi lainnya apabila memungkinkan di tingkat nasional. Terakhir, replikasi di daerah ini diharapkan dapat dilakukan untuk menjawab kebutuhan permasalahan yang ada di daerah agar tepat sasaran dan dapat meningkatkan kapasitas tata kelola serta daya saing daerah.

“Kalau dulu rantainya panjang mungkin karena pelakunya banyak sehingga nilai tambah yang diperoleh oleh pengrajin sedikit maka dengan memadainya rantai nilai, maka mungkin pendapatan dari pengrajin akan lebih besar. Jadi kajian itu adalah meletakkan pondasi untuk berpikir secara terintegrasi dari hulu sampai hilir” ucap Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.D. Tata Ruang & Penanganan Bencana-Bappenas dalam tanggapannya pada pertemuan ini.

Pendekatan yang tidak hanya multi pihak tetapi juga multi pengetahuan mulai dari proses agenda setting untuk mengidentifikasi isu-isu prioritas yang dibutuhkan untuk kajian kebijakan. Persiapan pelaksanaan kajian kolaborasi dan peran pengendali mutu yang sangat penting dalam memastikan kualitas hasil dari kajian yang dilakukan. Hasil kajian dengan bahasa ilmiah yang populer mudah dipahami prosesnya khususnya oleh pengambil kebijakan serta matriks rekomendasi kebijakan yang detail dan tentu aplikatif. Hal ini sangat penting di mana litbang menjadi fasilitator dari pelaksanaan kajian serta proses formulasi kebijakan yang dipimpin oleh OPD terkait dan keterlibatan aktif analis kebijakan, LSM dan juga akademisi. Disampaikan oleh Bappelitbangda, peran *intermediary* yang dijalankan oleh BaKTI menjadi teman diskusi dan berbagi serta menjadi fasilitator, konektor dan *quality control* dari keseluruhan proses.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Program Knowledge to Policy, Anda dapat menghubungi info@bakti.or.id



BELI SECUKUPNYA, PAKAI SEMUANYA DI ARTANI BULK STORE

Oleh **ITA IBNU**

Artani Bulk Store adalah toko ramah lingkungan yang berkonsep toko curah pertama di Kota Makassar di mana pembeli yang berbelanja dapat membeli sesuai kebutuhannya. Dengan *Tagline* “Beli secukupnya, pakai semuanya” bertujuan agar pembeli membeli sesuai kebutuhan dan mengurangi *Food Waste*.

Ria Lestari Baso mengawali ceritanya mendirikan Artani Bulk Store, yang ternyata dari berasal dari pengalamannya menyediakan makanan MPASI bagi bayinya yang baru berusia 6 bulan. Ria sapaan akrabnya kesulitan membeli bahan MPASI dalam jumlah sedikit, sesendok dua sendok, mengingat kebutuhan MPASI untuk anaknya memang tidak banyak. Terkadang walaupun Ria hanya membutuhkan sedikit namun karena bahan makanan yang tersedia di pasaran dijual dalam bentuk kemasan tertentu dan sering kali banyak yang terbuang, kedaluwarsa dan berakhir di tempat sampah. Sangat disayangkan.

Khawatir hal tersebut terus terjadi dan tentunya banyak juga ibu-ibu lainnya yang punya pengalaman yang sama seperti dirinya, akhirnya Ria berdiskusi bersama suaminya untuk mendirikan toko curah bahan makanan pertama di Kota Makassar. Berbekal ilmu yang dipelajari di bangku kuliah, Ria yang merupakan lulusan Sarjana Pertanian Universitas Brawijaya Malang, Ria kemudian menjajaki bisnis jual beli bahan makanan curah yang dijual secara *online* di tahun 2020. Di enam bulan pertama, fokus berjualan hasil olahan bahan pertanian seperti sorgum, beras merah. Setelah itu baru berkembang ke *ecokit*, *body care* yang terbuat dari



(kiri) Artani Bulk Store, toko curah yang ramah lingkungan dan Tea House (kanan atas) Berbagai produk makanan tersaji dalam wadah kaca (kanan bawah) Ria Lestari Baso pendiri Artani.
Sumber foto: Tangkapan layar Youtube/[Vestanesia](#)

bahan alami seperti lerak, sabun mandi, deterjen bubuk alami, sikat gigi kayu dan masih banyak lainnya.

Ada yang menarik dari Artani. Umumnya setiap toko menginginkan agar orang membeli sebanyak-banyak produk yang dijual. Namun di Artani, mendorong pembeli untuk membeli secukupnya saja sesuai kebutuhan, yang telah dibeli dicukupkan dan dihabiskan. Sehingga muncullah *tagline* “Beli Secukupnya, Pakai Semuanya”. Artani mencoba mengedukasi dan mendorong orang-orang untuk menormalisasi beli sesendok atau dalam jumlah sedikit untuk menghindari sampah makanan yang pada akhirnya akan merusak lingkungan tempat kita hidup.

Berdasarkan data yang dipaparkan *The Economist Intelligence Unit* tahun 2017, Indonesia sebagai penyumbang sampah terbesar kedua di dunia. Di mana bila dirata-ratakan, setiap individu menyumbang 300 kg sampah per tahunnya.

Hal lain yang perlu jadi perhatian adalah sampah atau limbah hasil olahan makanan. Faktanya, menurut data pengolahan sampah tahun 2019/2020, Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) limbah makanan

menyumbang sebesar 39% dari total sampah di Indonesia.

Fakta yang tidak bisa dihindari pula, nyatanya limbah makanan terbesar bukan berasal dari supermarket ataupun pasar tradisional. Penyumbang terbesar limbah makanan berasal dari rumah tangga yang tidak terlepas dari kebiasaan mengonsumsi melebihi porsi makan yang tidak dapat dihabiskan, membuat makanan dalam porsi besar, dan membeli makanan yang ternyata tidak sesuai keinginan sehingga harus berakhir di tempat sampah.

Dengan konsep toko curah dengan mendukung gaya hidup *Zero Waste*. Artani tidak menyediakan kemasan seperti kantong plastik kepada konsumennya. Konsumen yang berbelanja di Artani dapat membeli sesuai kebutuhannya, bubuk dalam bentuk gram dan volume dalam bentuk liter.

Nah dengan menormalisasi membeli dalam jumlah sedikit, orang-orang dengan sendirinya akan membiasakan diri membeli sesuai kebutuhan. Bahkan jika pembeli khawatir jika produk yang dibeli tidak sesuai selera, di Artani memungkinkan pembeli dahulu untuk mencoba beberapa varian produk di toko. Ini pula yang mendorong Artani kemudian mengembangkan bisnis toko dan *Tea House* menyajikan teh herbal nan *aesthetic* pertama di Kota Makassar. Tak disangka, ternyata justru *tea house* yang paling diminati pembeli yang umumnya mahasiswa dan pekerja kantoran.

Selain itu, model pemberdayaan dan tumbuh bersama pelaku usaha lainnya yang mempunyai *value* yang sama adalah hal yang menjadi “*spirit*” yang selalu dipegang teguh Artani hingga saat ini. Artani berkolaborasi bersama pelaku usaha lainnya yang belum memiliki toko *offline* agar menjual produk mereka di Artani dengan sistem konsiasi yang ditentukan oleh pelaku usaha tersebut. Tapi tidak sekadar menerima titip jual

saja, sebelumnya Artani melakukan kurasi dengan mencari tahu “Product Knowledge”. Dari mana produk tersebut berasal, siapa saja petani yang terlibat di dalamnya, pemberdayaan petani seperti apa, sistem budidaya, proses penanaman, *packaging*, waktu yang dibutuhkan dari petani hingga ke toko. Ini bertujuan untuk memperoleh cerita petani bukan hanya distributor/penjual yang membeli langsung dari petani. Sehingga pembeli juga mengetahui cerita di balik produk yang mereka beli. Setiap produk yang dijual di Artani memiliki cerita, dan untuk menyebarkan informasi ini, Artani mengemas cerita ini dan mempromosikannya di kanal-kanal media sosial Artani berjudul “Cerita dari Hulu”.

Artani juga mendukung sistem *Fair Trade* diterapkan sehingga pada akhirnya semua orang yang bergerak dari hulu ke hilir semua sejahtera. Jadi di Artani lebih fokus ke fungsionalnya dulu baru nilai estetikanya kemudian.

Selain itu, prinsip yang dipegang Artani agar produk yang dijualnya *trustable* dengan menyediakan informasi sedetail mungkin bagi pembeli, sehingga setiap staf di Artani memiliki pengetahuan dan cerita dari setiap produk.

Artani juga menjalankan konsep *B2B (Business to Business)* dengan memasok produk ke beberapa *café* dan resto di Kota Makassar, Artani memasok beberapa produk mereka. Uniknyanya Artani, mereka menyambut baik hadirnya usaha-usaha di bidang lingkungan, bukan sebagai kompetitor tetapi sebagai mitra untuk berkolaborasi, terus berinovasi dan belajar bersama. “Kami ingin toko kami menjadi medium bagi orang-orang punya usaha untuk tumbuh bersama” imbuh Ria.

Untuk produk-produk yang dijual di Artani sendiri memang umumnya produk yang telah dikeringkan sehingga memiliki masa simpan produk yang cukup panjang. Bukan tanpa alasan, jika panen raya tiba harga beberapa produk anjlok karena jumlahnya melimpah, alhasil banyak yang terbuang. Artani memberikan beberapa tips dan berbagi pengetahuan kepada petani mitra, bagaimana pengolahan hasil pertanian dengan metode pengeringan. Seperti

bunga telang, rosella, lemon, sekali panen bisa menghasilkan banyak sehingga dengan sistem pengeringan dan penyimpanan yang tepat maka produk tersebut tetap dapat dikonsumsi dengan kualitas dan rasa yang terjaga.

Ajakan menormalisasi 'beli secukupnya' terus digaungkan Artani melalui konten-konten di media sosial, selain itu Artani aktif berpartisipasi pada berbagai *event-event* yang digelar di Kota Makassar, tak hanya spesifik pada topik ramah lingkungan tapi *event* dengan topik yang lebih beragam dengan senang hati pasti dipenuhi Artani. “Kami lebih senang membicarakan dengan orang-orang yang belum pernah mendapatkan informasi tentang Artani dan kampanye ramah lingkungan. Kami berupaya sebanyak mungkin *sharing*, dengan berpartisipasi pada berbagai *event*”, ucap Ria.

Selain itu, Artani juga memiliki program Donasi Pohon, setiap orang yang berbelanja di Artani turut berdonasi pohon yang dikelola lembaga kredibel seperti Yayasan Lindungi Hutan, setiap bulannya pembeli dapat memantau dan mendapatkan *update* dari donasi mereka, lokasi dan berapa banyak pohon yang telah ditanam dari hasil donasi mereka.

Bagi Artani, ajakan untuk gaya hidup ramah lingkungan dimulai dari diri sendiri, tidak hanya ikut-ikutan tren tapi tak bertahan lama. Terkadang banyak yang *judge mental* kepada orang-orang yang masih memiliki gaya hidup boros, padahal mungkin saja serapan informasi dan mereka tumbuh di lingkungan yang berbeda.

“Harapan kami 5 tahun ke depan, kami ingin orang-orang Makassar terbiasa dengan gaya hidup ini, kami ingin pelan-pelan mengedukasi dan mengajak orang-orang, mereka merasakan *experience*, menikmatinya dan menemukan alasan mereka melakukan itu. Maka itu akan berkepanjangan, jadi nggak cepat bosannya. Sehingga mereka bisa kampanye ke orang lain karena mereka *share* pengalamannya”, pungkas Ria di akhir ceritanya.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Informasi lebih lanjut tentang Artani Bulk Store dapat mengunjungi Instagram [artani.id](https://www.instagram.com/artani.id)

MENELISIK KENDALA STATUS ODF DI KABUPATEN

Oleh **HAMSAH SINRING & SALEH JASTAM**

Sulawesi Selatan merupakan provinsi dengan persentase desa dan kelurahan tertinggi kedua (86.9%) setelah DI Yogyakarta (100%) yang sudah berstatus *Open Defecation Free* (ODF) atau Bebas dari Buang Air Besar Sembarangan (Profil Kesehatan RI, KeMenkes, 2020). Masih tersisa pekerjaan rumah lebih kurang 400 dari 3.047 desa dan kelurahan yang belum berstatus ODF.

Berdasarkan data STBM, 30 November 2020, masih ada 11 dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan yang belum mencapai ODF. Kabupaten tersebut yakni Pangkep, Maros, Jeneponto, Tana Toraja, Luwu Timur, Toraja Utara, Luwu Utara, Bone, Takalar, Bulukumba, dan Kota Makassar. Ditengarai desa dan kelurahan yang belum ODF itu boleh jadi menyebar di kabupaten/kota tersebut.

Pada hal pemerintah daerah di kabupaten/kota tersebut telah mengalokasikan anggaran secara berkelanjutan untuk percepatan akses jamban sehat keluarga melalui

program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), dengan kegiatan pemicuan CLTS (*Community Led Total Sanitation*), dan sosialisasi program Lima Pilar STBM pada semua lapisan masyarakat yang dilaksanakan oleh dinas kesehatan, pusat-pusat kesehatan dan sanitarian.

Sejumlah kabupaten tersebut mengalami stagnasi dan keterlambatan akselerasi mencapai 100% akses jamban sehat keluarga. Sebutlah kabupaten Pangkep, Maros, dan Jeneponto adalah kabupaten yang akses cakupan sanitasinya sudah tinggi. Namun ketiganya, berdasarkan data STBM Maret 2020, mengalami keterlambatan pergerakan akselerasi dari capaian terakhir di titik 89,1%, 89,6% dan 94,8%.

Lalu ada apa di 400 desa/kelurahan yang belum bebas dari praktik BABS itu? Didapati masih ada kelompok *Last Miles* (kelompok warga terakhir yang tidak mengakses jamban sehat keluarga) menjadi penyebab stagnasi dan keterlambatan mencapai 100% akses jamban sehat keluarga.

Kelompok *last mile* belum menjadikan jamban sebagai skala prioritas (kebutuhan primer) baik bagi kelas *upper-lower* maupun *lower-lower*. Skala prioritas kelas *lower-lower* lebih mengutamakan kebutuhan pokok (primer) untuk menyambung hidup sehari-hari, seperti: makan, minum dan kebutuhan pokok lainnya.

Kelompok Last Miles Jadi Hambatan Mencapai 100% Akses Jamban Sehat

Edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) termasuk Stop BABS oleh tenaga kesehatan dan upaya penciptaan kondisi melalui kebijakan pemerintah daerah telah dilakukan. Berbagai upaya dikerjakan melalui pemberian edukasi dan pemicuan serta visitasi *door to door* dalam berbagai kesempatan belum sepenuhnya dapat mengubah perilaku kelompok *last mile* untuk tidak melakukan praktik BABS.

Hasil kajian Unicef melalui Yayasan BaKTI bekerja sama dengan Pokja AMPL di kabupaten Pangkep, Maros, dan Jeneponto memetakan kelompok *last mile* dalam dua klasifikasi status ekonomi, yaitu *upper-lower* dan *lower-lower*. Kelas *upper-lower* merupakan warga dengan pendapatan satu - dua juta rupiah, sedangkan kelas *lower-lower* kurang dari satu juta rupiah per bulan. Kedua kelompok *last mile* tersebut masih mempraktikkan BABS disebabkan berbagai faktor.

Faktor penyebab BABS pada kelompok *last mile* dibedakan dalam tiga kelompok, yaitu: faktor predisposisi (*predisposing factors*), faktor penguat (*reinforcing factors*) dan faktor pemungkin (*enabling factors*).

Faktor predisposisi merupakan faktor penyebab lambatnya akses jamban dari internal kelompok *last mile*. Kelompok *last mile* belum menjadikan jamban sebagai skala prioritas (kebutuhan primer) baik bagi kelas *upper-lower* maupun *lower-lower*. Skala prioritas kelas



lower-lower lebih mengutamakan kebutuhan pokok (primer) untuk menyambung hidup sehari-hari, seperti: makan, minum dan kebutuhan pokok lainnya. Sedangkan kelas *upper-lower* lebih mengutamakan kebutuhan sekunder dan tersier, seperti: kepemilikan kendaraan bermotor, renovasi rumah, kebutuhan pesta bahkan sampai pada perjalanan umrah.

Pengabaian kebutuhan jamban semakin kuat apabila warga *last mile* menempati lahan yang bukan milik sendiri. Sebagian *last mile* menempati rumah yang dibangun di atas lahan milik orang lain. Skala prioritas juga diperparah dengan adanya persepsi terhadap pembangunan jamban yang mahal.

Sementara itu, faktor penguat berasal dari eksternal kelompok *last mile*. Sinergi lintas sektor khususnya antara puskesmas dengan pemerintah desa dalam upaya pencapaian akses jamban belum optimal. Pemerintah desa cenderung mengharapkan kinerja lebih pada pihak puskesmas. Menurutnya hal itu menjadi tanggungjawab pihak puskesmas karena berkaitan dengan program kesehatan. Pada sisi



lain, pihak puskesmas juga sangat berharap kepada pemerintah desa agar menggunakan kewenangannya dalam pencapaian ODF.

Adapun faktor pemungkin berupa faktor lingkungan, seperti akses air bersih yang rendah, akses jalan/transportasi yang sulit, luas lahan, dekat pesisir, dan keberadaan sungai. Namun kondisi ini bisa teratasi jika terjadi sinergitas yang baik antara pihak puskesmas dengan pihak pemerintah desa.

Praktik baik (*best practice*) sinergi pihak terkait dalam menjangkau kelompok *last mile* BABS dapat dilihat di Dusun Belaka Desa Gentung Kab. Pangkep. Wilayah tersebut sulit mengakses air bersih dan kondisi jalan hanya pematang empang, namun dusun tersebut bisa ODF. Tercapainya ODF Dusun Belaka Desa Gentung disebabkan adanya program bantuan bak air tahun 2017 dan bantuan jamban tahun 2018. Terlaksananya program ini atas kerja sama antara pihak Puskesmas Labakkang dengan Pemerintah Desa Gentung.

Untuk percepatan ODF, maka disarankan kepada pihak pemerintah desa/kelurahan agar program bantuan pembangunan sarana sanitasi

dan air bersih difokuskan kepada kelas *lower-lower* yang pendataannya dikoordinasikan dengan pihak puskesmas. Pemberian bantuan sarana sanitasi kepada kelas *lower-lower* perlu dilanjutkan dengan bantuan padat karya yang lebih produktif. Bantuan padat karya disesuaikan dengan teknologi dan potensi sumber daya lokal, untuk menambah pendapatan kelas *lower-lower* guna keberlanjutan penggunaan sarana sanitasi yang sudah dibangun.

Pihak puskesmas diharapkan agar mengoptimalkan pemberian edukasi mengenai PHBS (Stop BABS), baik melalui pemucuan maupun secara *door to door* kepada warga utamanya kelas *upper-lower* melalui kerja sama dengan pihak pemerintah desa. Dibutuhkan sinergi antara camat, kepala desa/lurah, Babinsa, sanitarian, petugas Promkes, petugas PIS-PK, fasilitator STBM, BPMD, dan OPD terkait dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan program pencapaian akses jamban.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang program Kerja Sama Unicef - BaKTI dapat menghubungi info@bakti.or.id



INI CARA IBU-IBU HALMAHERA SELATAN BELAJAR ILMU BERTANI

Oleh **MAHMUD ICHI**

Sebuah hal yang tidak biasa mereka kerjakan selama ini dalam bertani. Memelototi kertas petunjuk bertuliskan cara membuat pupuk organik, lalu mengumpulkan bahan-bahan yang ada di sekitar rumah dan tidak ragu saat harus membeli bahan ke Ternate. Mereka juga membaca dengan seksama petunjuk pembuatan pupuk organik sebelum mengumpulkan alat dan bahan dan memproses pupuk organik cair majemuk dan tunggal. Ibu-ibu di Desa Samat, Gane Barat Utara di Halmahera Selatan sejak Januari 2021, mulai mengerjakan pembuatan pupuk organik di desa mereka.



Sumber : <https://kabarpulau.co.id/>

Setelah proses empat hari empat malam, mereka kemudian memanen hasilnya, kemudian dipraktikkan penggunaannya di demplot yang mereka buat di pekarangan rumah. “Inilah cara ibu-ibu Desa Samat menambah pengetahuan dalam bertani sekaligus mempraktikkan apa yang telah mereka pelajari dari kegiatan Sekolah Transformasi Sosial,” jelas Faldi Hi Ibrahim pendamping ibu-ibu desa Samat. Sekolah Transformasi Sosial (STS) digelar oleh Insist Yogyakarta dan Lembaga Pengembangan Teknologi Pedesaan (LPTP) bersama EcoNusa Indonesia di Desa Samo Gane Barat Utara selama 15 hari pada pertengahan 2020 lalu Ibu-ibu Desa

Samat ini belajar dengan mulai mengenal dan membuat mikroorganisme lokal atau sering disebut mol yang berfungsi mempercepat proses penguraian bahan-bahan organik. Mereka memulai dengan membuat sumber bakteri menggunakan bahan-bahan yang berasal dari bonggol pisang atau hati batang pisang, susu, limbah ikan, limbah perut ternak kambing, limbah tahu dan terasi. Sumber karbohidrat yang digunakan dalam pembuatan mol berupa air cucian beras 30 liter, nasi basi atau singkong yang diparut, atau umbi-umbian lainnya, gula merah tetes tebu, air kelapa dan biang bakteri EM-4.

Bahan bahan ini dipelajari ibu-ibu kemudian diproses menjadi mol yang nanti berfungsi mengemburkan tanah sebagai media tanam. “Hal yang sama juga mereka lakukan dalam membuat pupuk tunggal dan majemuk organik dengan bahan-bahan yang telah disiapkan berdasarkan buku petunjuk dan praktik yang telah diikuti selama sekolah lapang,” jelas Faldi.



Sumber : <https://kabarpulau.co.id/>

Menurut Faldi, kelompok ibu-ibu Desa Samat telah melakukan proses ini setelah sebelumnya koordinator kelompok mereka Samina Hi Aba (49 tahun) mengikuti sekolah transformasi sosial (STS).

Dalam kegiatan STS itu mereka diajarkan berbagai hal. Salah satunya belajar membuat pupuk organik selama sekolah lapang berlangsung. “Ini bentuk praktiknya dengan membuat kelompok dan mempraktikkan apa yang telah didapat selama pendidikan tersebut,” jelasnya.

Saat ini sebanyak dua puluh orang anggota bersama koordinatornya membuat demonstrasi plot (demplot) di pekarangan masing-masing dan menanam berbagai jenis sayuran. Sayuran ini ditanam dan dipelihara menggunakan pupuk organik hasil buatan mereka sendiri.

Dampak dari pembuatan demplot organik tersebut, bukan hanya pemanfaatan lahan pekarangan, namun juga berdampak pada pemahaman penggunaan pupuk organik cair. Sebelumnya, hasil panen pembuatan pupuk organik cair, tersebut dibagi merata pada masing-masing anggota kelompok, sesuai ukuran dan jenisnya.

Samina Hi Aba yang juga koordinator kelompok ibu-ibu Desa Samat mengatakan “Pada Januari 2021 lalu kami melalui praktik pembuatan yang mereka lakukan empat malam berhasil memanen pupuk tunggal organik, dua puluh liter nitrogen, dua puluh liter pupuk organik kalium, dua puluh liter pupuk organik fosfor serta empat puluh lima liter pupuk organik majemuk atau NPK.

“Kami dapat hasil tersebut karena, kelompok Desa Samat, masih menggunakan media galon takaran dua puluh lima liter dan sebuah ember. Kami masih butuh empat buah drum dan bibit juga kurang, yaitu sepuluh saset saos tomat, sepuluh bungkus rica nona super, sepuluh timun hercules, sepuluh ikat sawi besar, sepuluh ikat kangkung, sepuluh buah pare, sepuluh terong ungu,” kata Samina.

Tanaman atau sayur yang dibudidayakan kelompok tani Desa Samat itu di demplot pekarangan masing-masing dengan membuat satu bedengan kangkung, satu bedengan bayam hijau, satu bedengan bayam merah dan tiga bedengan sawi.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Artikel ini bersumber dari: <https://kabarpulau.co.id/ini-cara-ibu-ibu-halmahera-selatan-belajar-ilmu-bertani/>

DISKUSI ONLINE LIVE DI **Instagram Story @infobakti**



Melindungi dan Melayani Anak Rentan di Masa Pandemi

Apakah Anda pernah mendengar atau membaca tentang Sakti Peksos? Istilah ini mungkin masih asing di telinga Anda. Namun apa yang dikerjakan Sakti Peksos, ada di sekitar Anda, memastikan anak-anak rentan memperoleh perlindungan dan pelayanan terpenuhi hak-haknya secara tepat dan layak. Sakti Peksos juga mendampingi anak yang telah menjadi korban dalam proses hukum dan pemulihan psikososial.

Bagaimana Sakti Peksos bekerja melindungi dan melayani anak-anak rentan secara khusus di masa pandemi?.



Anak Muda Canggih: Jadi Petani dan Bikin Koperasi

Bertani seringkali dianggap tidak memberikan jaminan finansial karena banyak anak muda melihat sebagian besar petani memiliki pendapatan yang rendah, tinggal di rumah yang sederhana, dan bergaya hidup seadanya.

Kiki Abbas memiliki pandangan yang berbeda. Setelah menamatkan kuliah dan bekerja di NGO lokal, Kiki memutuskan untuk kembali ke kampung halaman di Ruteng dan menginisiasi Sayur Mayur Ruteng, sebuah platform aplikasi digital yang menghubungkan petani dan pembeli.

Selain aktif mengajak anak-anak muda di Ruteng untuk kembali bertani, Kiki juga menginisiasi berdirinya koperasi sektoral guna mendukung geliat ekonomi dari sektor pertanian.



Posyandu Prakonsepsi: Inovasi Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Stunting

Kasus kematian ibu dan bayi di Indonesia terbilang masih tinggi. Hal ini juga terjadi juga di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Data tahun 2015, Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Banggai sebesar 205 per 100.000 kelahiran hidup dan Angka Kematian Bayi (AKB) 23 per 1.000 kelahiran hidup, serta angka prevalensi stunting sebesar 35,6%.

Berangkat dari permasalahan itu, Pemerintah Kabupaten Banggai melalui Dinas Kesehatan menggagas inovasi Posyandu Prakonsepsi, sebuah pendekatan baru dengan kolaborasi lintas sektor dalam merencanakan generasi emas yang sehat dan berkualitas di masa mendatang sekaligus sebagai strategi baru dalam mencegah kematian ibu dan anak serta stunting.

Artikel

Gerakan Konservasi dari Pemuda Melaumkarta

Ibarat ibu kandung, hutan memiliki peran yang sangat besar bagi kehidupan Suku Moi, kelompok masyarakat adat yang menghuni Kampung Malaumkarta di Kabupaten Sorong, Papua Barat. Ini adalah sebuah kampung yang berada di sekitar hutan. Mengingat hutan berada di sekeliling mereka, suku Moi menyebut hutan sebagai Tam Sini. Artinya, ibu kandung yang memberi makan dan minum. "Hutan sudah menjadi bagian yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan mereka sehari-hari," ujar Torianus Kalami, pemuda asli suku Moi dalam sebuah wawancara dengan tim riset Katadata beberapa waktu lalu. Tori – panggilan akrab Torianus - adalah salah seorang pemuda pelopor dari suku Moi. Sejak 2008, dia sudah merintis gerakan dengan mengorganisasi anak muda kampung sebagai ujung tombak untuk memperjuangkan hak atas tanah, hak atas sumber daya alam dan pengetahuan tradisional. "Pemuda adalah tulang punggung. Mereka yang akan berpengaruh dan memberi informasi kepada orang tua di rumah dan dengan sendirinya mengorganisir orang di rumah," ujarnya. Dia menekankan kehidupan masyarakat Moi dan Papua pada umumnya bergantung pada hutan dan laut sehingga pendekatan masyarakat harus berdasarkan itu.

■ <https://batukarinfo.com/komunitas/articles/gerakan-konservasi-dari-pemuda-melaumkarta>

Berita Terbaru

Kekerasan Gender Berbasis Online Naik Empat Kali Lipat

Berdasarkan data yang dihimpun Komnas Perempuan, angka kasus kekerasan berbasis gender di ruang online (KBGO) meningkat dari yang tadinya 241 kasus pada 2019, naik menjadi 940 kasus pada 2020 atau empat kali lipat.

Hal yang sama dari laporan Lembaga Layanan. Jika pada 2019 hanya terdapat 126 kasus KBGO maka pada 2020 kasus KBGO naik menjadi 510 kasus, atau tiga kali lipatnya.

"Meningkatnya angka kasus kekerasan berbasis gender di ruang online/daring ini sepatutnya menjadi perhatian serius semua pihak," kata Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga. Dalam hal pencegahan, ia menyebutkan, perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam membangun ketahanan keluarga termasuk memberikan keamanan pada anak dari ancaman kejahatan digital di media sosial. "Karakteristik dunia digital yang tanpa batas (borderless), saat ini telah memunculkan berbagai kejahatan yang harus diwaspadai," seru Bintang.

■ <https://batukarinfo.com/news/kekerasan-gender-berbasis-online-naik-empat-kali-lipat>

Referensi



Buku Panduan Melakukan Monitoring dan Evaluasi Sederhana atas Kegiatan Sinergi Perencanaan Kampung dan Unit Layanan

Dalam pendekatan model sinergi perencanaan, tujuan utama dari memperbaiki kualitas perencanaan kampung dan unit layanan bukanlah keterlaksanaan kegiatan yang direncanakan, melainkan perubahan yang dihasilkan dan dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, perencanaan selalu didasarkan pada masalah atau kondisi aktual masyarakat (terutama terkait pendidikan dan kesehatan) yang hendak diperbaiki. Untuk itu, selain menyiapkan panduan untuk membuat perencanaan secara praktis, program KOMPAK-LANDASAN Fase II juga merasa perlu menyiapkan panduan untuk mengawal pelaksanaan dari rencana kegiatan dan mengukur capaiannya. Oleh karena itu, buku ini juga khusus disiapkan sebagai salah satu alat bantu praktis bagi distrik dalam melakukan peran pembinaan dan pengawasan kampung. Sebuah panduan yang sederhana namun operasional untuk dilaksanakan.

■ <https://batukarinfo.com/referensi/buku-panduan-melakukan-monitoring-dan-evaluasi-sederhana-atas-kegiatan-sinergi-perencanaan>